



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
BALAI PENGELOLA TRASPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Dani M Yanuar	Penyusun Rencana dan Pelaporan	4/1/2023	
2	Dikonsep	Gilang Adi Subagja, S.AP.	Penyusun Rencana dan Pelaporan	4/1/2023	
3	Diperiksa	Danny Irawan Siswoyo, S.SiT.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9/1/2023	
4	Disetujui	Danny Irawan Siswoyo, S.SiT.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9/1/2023	
5	Disetujui	Edi Kurniadi, S.T.	Kepala Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	9/1/2023	
6	Disetujui	Tofan Muis, A.Md., LLAJ., S.E., M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9/1/2023	
7	Disetujui	Supriyanto, S.SiT., M.T.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan	9/1/2023	
8	Disetujui	Denny Michels Adlan, S.T., M.M.	Kepala BPTD Wil. IX Jabar	9/1/2023	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan Tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Draft Rencana Strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 19 (sembilan belas) dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan dengan sangat baik. Dengan hasil 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$).

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan yaitu sebesar 138,60%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan sangat baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam draft Rencana Strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

KATA PENGANTAR



Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

Sebagai instansi pemerintah yang mandiri, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat juga perlu untuk menyusun sebuah Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai acuan dan tolak ukur pengukuran kinerja setiap triwulanan, adapun untuk posisi triwulan IV menjadi sebuah Laporan Kinerja secara keseluruhan di akhir tahun. Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan selama triwulan berjalan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2022 maupun laporan kinerja selama periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode tahunan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Bandung, 9 Januari 2023

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat,**



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

DAFTAR ISI

	RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
	KATA PENGANTAR.....	ii
	DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	I.1 Latar Belakang.....	1
	I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
	I.3 Sumber Daya Manusia.....	5
	I.4 Potensi, Isu, Strategis dan Permasalahan.....	5
	I.4.1 Kewenangan.....	5
	I.4.2 Sumber Daya Manusia.....	6
	I.4.3 Anggaran.....	6
	I.4.4 Isu Strategis.....	7
	I.4.5 Ruang Lingkup.....	7
	I.5 Sistematika Pelaporan.....	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	15
	II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	15
	II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
	III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	25
	III.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	28
	A. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Atarmoda Transportasi.....	28
	A.1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.....	28
	A.1.1 Definisi Indikator Kinerja.....	28
	A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	29
	A.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	30
	A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	31
	A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	32
	A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	33
	A.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.....	33
	A.2.1 Definsi Indikator Kinerja.....	33
	A.2.2 Perbandungan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022...	34
	A.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	34

A.2.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	34
A.2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	35
A.2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	36
A.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi.....	36
A.3.1	Definisi Indikator Kinerja.....	36
A.3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	37
A.3.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	38
A.3.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	38
A.3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	39
A.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	40
A.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda.....	40
A.4.1	Definisi Indikator Kinerja.....	40
A.4.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	41
A.4.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	41
A.4.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	42
A.4.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	42
A.4.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	43
A.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kepirintisan Angkutan Penyeberangan.....	43
A.5.1	Definisi Indikator Kinerja.....	43
A.5.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	44
A.5.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	44
A.5.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	45
A.5.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021,	45

	Tahun 2022.....	
A.5.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	46
A.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi.....	46
A.6.1	Definisi Indikator Kinerja.....	46
A.6.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	47
A.6.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	47
A.6.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	49
A.6.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	50
A.6.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	51
B.	SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.....	51
B.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A.....	51
B.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	52
B.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	52
B.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	53
B.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	54
B.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	55
B.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	56
B.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A.....	56
B.2.1	Definisi Indikator Kinerja.....	56
B.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	57
B.2.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	57
B.2.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	58
B.2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	60
B.2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	61
B.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum	61

	(SPM) Di Pelabuhan SDP.....	
	B.3.1 Definisi Indikator Kinerja.....	61
	B.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	62
	B.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	63
	B.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	64
	B.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	65
	B.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	66
C.	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.....	66
	C.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	67
	C.1.1 Definisi Indikator Kinerja.....	67
	C.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	67
	C.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	68
	C.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	69
	C.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	70
	C.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	71
	C.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	72
	C.2.1 Definisi Indikator Kinerja.....	72
	C.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	72
	C.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	73
	C.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	74
	C.2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	75
	C.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	75
	C.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, Dan Batas Kecepatan.....	76
	C.3.1 Definisi Indikator Kinerja.....	76
	C.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	77

	Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	
C.3.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	77
C.3.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	78
C.3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	78
C.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	80
C.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif.....	81
C.4.1	Definisi Indikator Kinerja.....	81
C.4.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	81
C.4.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	81
C.4.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	81
C.4.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	82
C.4.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	83
C.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	84
C.5.1	Definisi Indikator Kinerja.....	84
C.5.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	84
C.5.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	85
C.5.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	85
C.5.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	86
C.5.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024	87
C.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*.....	87
C.6.1	Definisi Indikator Kinerja.....	87
C.6.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	88
C.6.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	88
C.6.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	88
C.6.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022	89

	Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	90
C.6.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	90
C.7	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.....	90
C.7.1	Definisi Indikator Kinerja.....	90
C.7.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	91
C.7.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	92
C.7.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	92
C.7.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	92
C.7.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	93
C.8	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP.....	93
C.8.1	Definisi Indikator Kinerja.....	93
C.8.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	94
C.8.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	94
C.8.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	96
C.8.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	97
C.8.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	98
D.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	99
D.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	99
D.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	99
D.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022..	99
D.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	100
D.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	100
D.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	100

	D.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	101
E.	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	103
	E.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	103
	E.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	103
	E.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022.	103
	E.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	104
	E.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	104
	E.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.....	105
	E.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	106
III.3		Realisasi Anggaran.....	107
	III.3.1	Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	107
	III.3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	118
	III.3.3	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	121
	III.3.4	Hambatan dan Kendala.....	122
BAB IV	PENUTUP	123
	IV.1	Penutup.....	123
	IV.1.1	Ringkasan Capaian.....	123
	IV.2	Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	125
LAMPIRAN			
1		Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022	
2		Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
3		Rencana Aksi Tahun 2022	
4		Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022	
5		Revisi Rencana Aksi I Tahun 2022	
6		Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022	
7		Revisi Rencana Aksi II Tahun 2022	
8		Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022	

BAB I

PENDAHULUAN



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang mandiri juga perlu untuk menyusun LKIP sebagai acuan dan tolok ukur pengukuran kinerja sertiap tahunnya. Penyusunan LKIP oleh BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode triwulan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

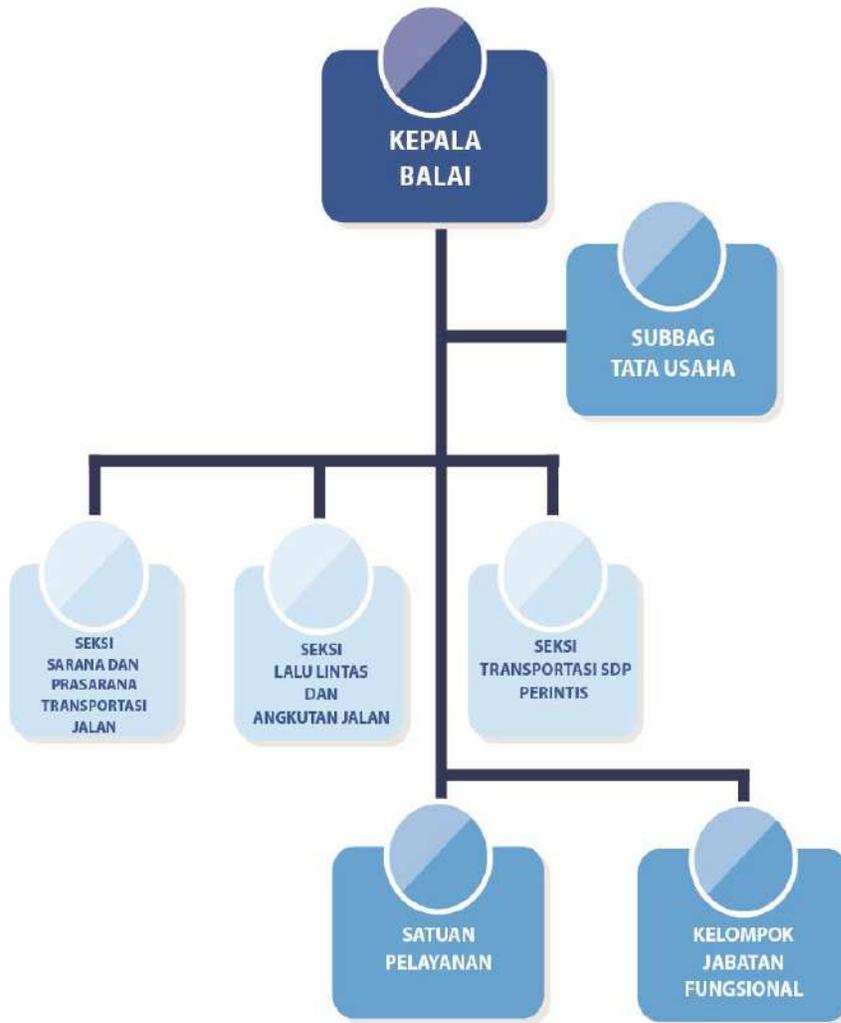
1. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum di usahakan secara komersial.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan industri karoseri;
 - c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
 - d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD TIPE B



Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPTD Tipe B dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Nasional dan pengujian kendaraan bermotor dan industri karoseri.

3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan barang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

4. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

5. Satuan Pelayanan

Melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 463 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga) orang. Alokasi jumlah pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), untuk masing-masing satuan pelayanan dan kantor induk sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI		
		PNS	PPNPN	JUMLAH
A	Kantor Induk	42	48	90
B	Satpel Terminal			
	1. TTA Harjamukti – Cirebon	23	21	44
	2. TTA Indihiang – Tasikmalaya	25	23	48
	3. TTA KH. Ahmad Sanusi - Sukabumi	17	36	53
	4. TTA Ciakar – Sumedang	13	26	39
	5. TTA Guntur Melati – Garut	26	36	62
	6. TTA Banjar	20	31	51
	7. TTA Cikampek	3	12	15
	8. TTA Subang	9	24	33
	9. TTA Kertawangunan – Kuningan	13	18	31
	10. TTA Leuwipanjang – Bandung	23	50	73
C	Satpel UPPKB			
	1. UPPKB Balonggandu – Karawang	25	20	45
	2. UPPKB Losarang – Indramayu	17	27	44
	3. UPPKB Kemang - Bogor	16	10	26
	4. UPPKB Tomo – Sumedang	17	17	34
	5. UPPKB Gentong – Tasikmalaya	24	16	40
	6. UPPKB Cibaragalan - Purwakarta	8	15	23
	7. UPPKB Bojong - Cianjur (belum beroperasi)	1	3	4
	8. UPPKB Sindangrasa - Ciamis (aset dialihkan ke Pemda Ciamis)	-	-	-
D	Wilayah Kerja TSDP	4	30	34
TOTAL		326	463	789

Tabel I.1 Komposisi Pegawai BPTD JABAR Tahun 2022

Sumber : Pengelola Kepegawaian (Posisi 31 Desember 2022)

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

I.4.1. Kewenangan

a. *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;

- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. *PM No. 122 Tahun 2018*

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terutama dalam rangka penunjang pelaksanaan tupoksi sejalan dengan program kinerja yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
2. Pengoperasian Terminal Penumpang;
3. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
4. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
5. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
6. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
7. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
8. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
9. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal Tipe A dan UPPKB serta Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.
10. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2022 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Balai Pengelola Transportasi Darat IX Jawa Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3 Sumber Daya Manusia

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

- Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022
- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

A. SK1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

A.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.2. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

A.2.1. Definisi Indikator Kinerja

A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.3. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi

- A.3.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- A.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.3.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- A.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.4. IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda

- A.4.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.4.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- A.4.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- A.4.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.5. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

- A.5.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.5.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- A.5.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.5.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- A.5.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.6. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

- A.6.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.6.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- A.6.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- A.6.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.6.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- A.6.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

B. SK2 MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

• **Uraian Sasaran Kegiatan**

B.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

B.2. IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

- B.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

B.3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

- B.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- B.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

- B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C. SK4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

• **Uraian Sasaran Kegiatan**

C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan

- C.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- C.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.4. IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

- C.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- C.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.5. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- C.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- C.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.6. IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

- C.6.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- C.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.7. IKK 7.a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- C.7.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C.7.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- C.7.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.7.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- C.7.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.8. IKK 7.b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

- C.8.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.8.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C.8.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.8.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.8.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- C.8.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

D. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

D.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- D.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- D.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022
- D.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2022

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2022
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2022
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- *Refocusing* Anggaran Tahun 2022
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2022
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2022
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2022

- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 – 2022

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Tahun 2022;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2022;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2022;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat Tahun 2022 sesuai draft Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat 2020-2024.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-

- Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPTD Tahun 2020-2024, dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dan tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dalam perkembangannya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengalami penambahan terutama dalam hal penambahan sasaran kegiatan yang tercantum berdasarkan hasil perumusan revisi manual Indikator Kinerja Utama BPTD dan penyusunan draft rencana strategis Tahun 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

II.2 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Dalam perkembangannya, Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya seiring adanya revisi manual Indikator Kinerja Utama yang berlaku di lingkungan BPTD dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 5.936.848.000
2.	Program Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 43.361.195.000
3.	Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 29.440.422.000
4.	Program Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.447.693.000
5.	Program Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 37.386.361.000
6.	Program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 39.421.116.000
	TOTAL	Rp. 159.993.635.000

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022

Sehubungan dengan adanya perubahan pagu anggaran terakhir di BPTD IX Jawa Barat, maka pada tanggal 1 Agustus 2022 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	5.777.195.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	43.361.195.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	29.060.422.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.827.693.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	37.386.361.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	39.421.116.000
	TOTAL	Rp.	159.833.982.000

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022

Sehubungan adanya pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan adanya perubahan pagu anggaran terakhir di BPTD IX Jawa Barat, maka pada tanggal 02 Desember 2022 dilakuka revisi Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	5.511.486.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	p.	42.550.733.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	32.821.919.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	6.866.856.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	37.386.361.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	36.749.055.000
	TOTAL	Rp.	161.886.410.000

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan secara mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada umumnya serta Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat pada khususnya, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- **Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2022**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan target dan realisasi kinerja terhadap perjanjian kinerja 2022, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Wilayah IX Jawa Barat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dari total 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPTD, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian BPTD Wilayah IX Jawa Barat maka diperoleh data Capaian Kinerja adalah sebesar **158,33 %**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut :

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022	TW I			TW II			TW III			TW IV			CAPAIAN TW I 2022	CAPAIAN TW II 2022	CAPAIAN TW III 2022	CAPAIAN TW IV 2022
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C				
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan					100%			100%			100%			100%	87.50%	91.67%	96.67%	100.00%
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	25	25	100%	50	50	100%	80	80	100%	100	100	100%	25.00%	50.00%	80.00%	100.00%
IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	10	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					100%			100%			100%			100%	25.00%	85.00%	85.00%	100.00%
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	25	25	100%	85	85	100%	85	85	100%	100	100	100%	25.00%	85.00%	85.00%	100.00%
IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe A	%	100	25	25	100%	85	85	100%	85	85	100%	100	100	100%	25.00%	85.00%	85.00%	100.00%
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	25	25	100%	85	85	100%	85	85	100%	100	100	100%	25.00%	85.00%	85.00%	100.00%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					97.50%			87.50%			87.50%			100%	62.18%	72.62%	78.53%	100.00%
IKK 3.1	Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	20	20	100%	60	60	100%	70	70	100%	90	90	100%	22.22%	66.67%	77.78%	100.00%
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditemui Perhubungan Darat	%	35	10	18	180%	15	15	100%	21	21	100%	35	35	100%	51.43%	42.86%	60.00%	100.00%
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	21	5	5	100%	15	15	100%	19	19	100%	21	21	100%	23.81%	71.43%	90.48%	100.00%
IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
IKK 3.6	Jumlah fasilitas penujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-	Unit	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 7.a	Persentase standarisasi penujian berkala kendaraan bermotor	%	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	15	0	0	100%	0	0	100%	15	15	100%	15	15	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi					100%			100%			100%			100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat					100%			100%			100%			100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
IKK 6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100%			98%	0%	0%	98%	0%	0%	100%	74.94%	89.86%	92.04%	100.00%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						157%			150%			150%			158%	108.12%	132.16%	138.60%	158.33%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKP ≥ 100%)						18			18			18			18	11	11	12	19
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Kurang dari 100% (0% ≤ IKP < 100%)						1			1			1			1	8	8	7	0

A. SK1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT dan KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan salah satu direktorat di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 1.1.Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan;
2. IKK 1.2.Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda;
3. IKK 1.3.Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi;
4. IKK 1.4.Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
5. IKK 1.5.Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan;
6. IKK 1.6.Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

A.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

A.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Ada dua kriteria untuk menetapkan angkutan jalan perintis, yaitu faktor finansial dan faktor keterhubungan.

Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antardaerah masih rendah, trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

Sedangkan kriteria faktor keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang

belum dilayani angkutan umum, menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, melayani daerah yang terkena dampak bencana alam, dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis.

Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki trayek tetap dan teratur;
- b. Sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- c. Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- d. Lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- e. Mencantumkan informasi trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- f. Memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan
- g. Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari jumlah kendaraan yang dioperasikan.

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

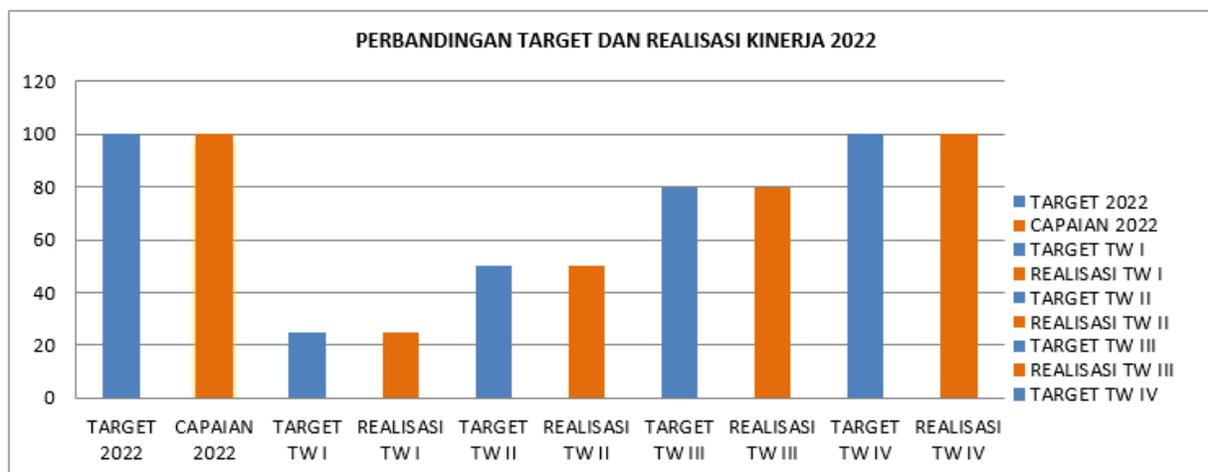
$$= \frac{\text{Jumlah RIT Realisasi pada Tahun 2022}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya

A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%.

Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.1. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	25	25	50	50	80	80	100	100

A.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.DRJD 3385 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022, sebanyak 338 trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis.

Hakekat pemberian subsidi bagi angkutan perintis adalah lokasi pelayanan untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal. Di lokasi tersebut pula tidak ada penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis diharapkan dapat mengembangkan potensi perekonomian daerah. Keberadaan bus keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2022 didukung dengan kegiatan Layanan Angkutan Jalan Perintis berupa pemberian subsidi angkutan keperintisan di wilayah Bandung dan Bogor berdampak pada terlayannya aksesibilitas transportasi darat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dilalui trayek angkutan perintis.

Dari layanan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di wilayah Bandung dan Bogor Tahun 2022 diketahui bahwa :

$$\begin{array}{r}
 \text{Jumlah RIT Realisasi s/d TW IV} \\
 37.966 \text{ RIT} \qquad \qquad \qquad \times 100\% \\
 = \\
 \hline
 \text{Jumlah RIT yang direncanakan} \\
 37.966 \text{ RIT}
 \end{array}$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp. 5.510.773.307,- dari total pagu sebesar Rp. 5.511.486.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Subsidi Angkutan Keperintisan Bandung dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.979.628.000,- dan realisasi s/d mencapai Rp. 2.978.728.380,- atau 99,90%
2. Subsidi Angkutan Keperintisan Bogor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.531.486.000,- dan realisasi s/d mencapai Rp. 2.531.144.927,- atau 99,99%.

A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan melalui :

1. Pemberian subsidi bagi angkutan perintis yang melayani masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal (pengusulan rute baru);
2. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan keperintisan;
3. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara mandiri.

A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

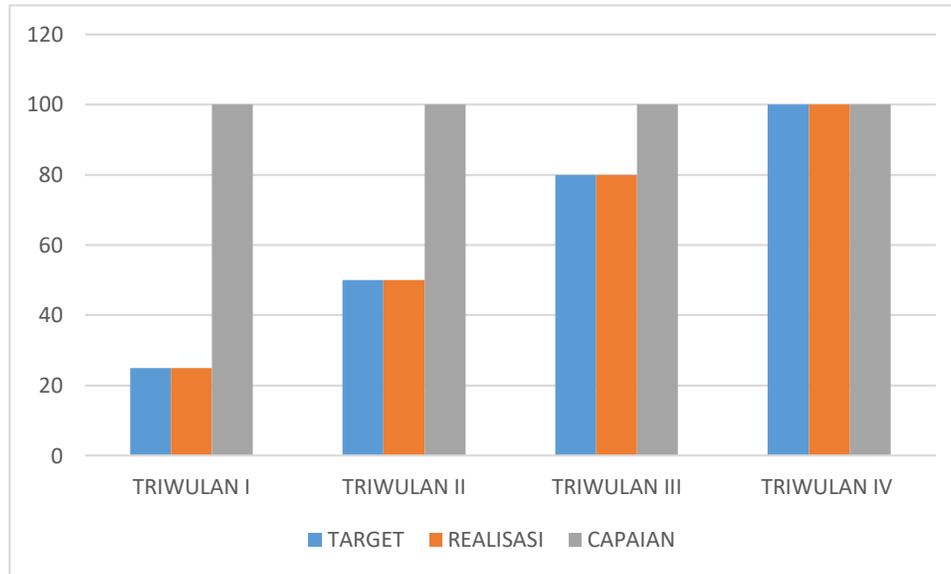
Realisasi kinerja presentase pelaksanaan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2022 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi											
IKK.1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan
IKK.1.6	Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	

A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Realisasi kinerja presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.2 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	25	50	80	100
REALISASI	25	50	80	100
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

A.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

A.2.1 Definisi Indikator Kinerja

Simpul transportasi nasional terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. Pada tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) simpul transportasi nasional yang telah dilayani oleh angkutan antarmoda, diantaranya: (1) Bandar Udara Komodo, (2) Bandar Udara Silangit, (3) Bandar Udara Internasional Kertajati, (4) Bandar Udara Lombok, (5) Bandar Udara NYIA, (6) Bandar Udara Adi Sutjipto, (7) Stasiun Tugu, (8) Pelabuhan Lembar, (9) Terminal Mandalika, dan (10) Pelabuhan Labuan Bajo.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

A.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.3. Grafik Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

A.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

A.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan pelayanan subsidi angkutan antarmoda di sejumlah simpul transportasi di wilayah Provinsi Jawa Barat

A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

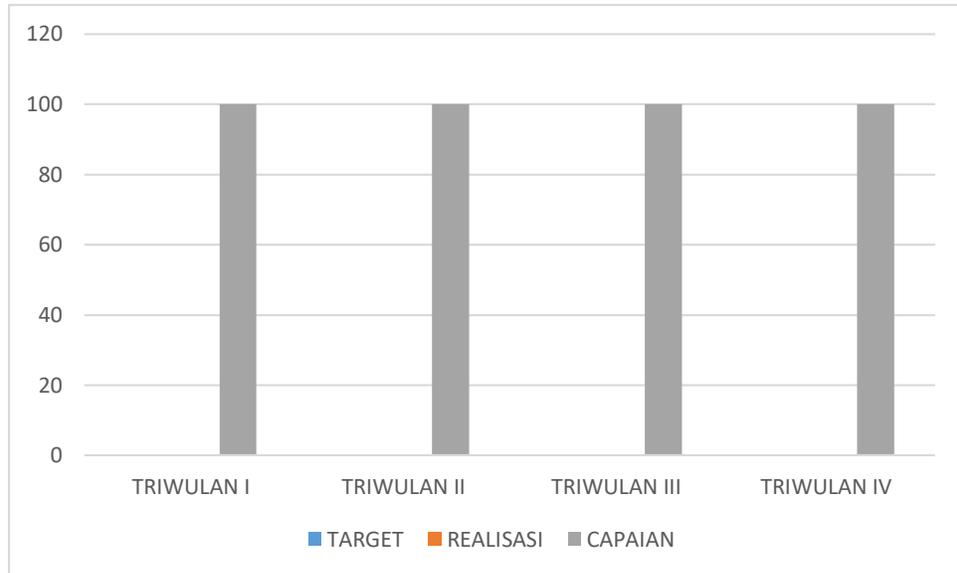
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda baik pada Tahun 2020, Tahun 2021 maupun Tahun 2022, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi											
IKK.1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.4 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

A.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

A.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.

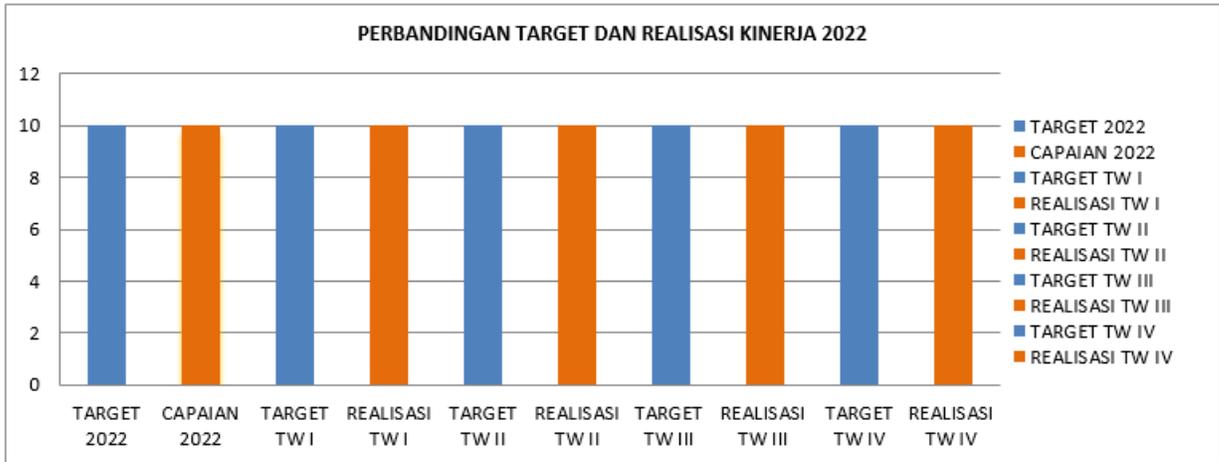
Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

A.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 10 Lokasi dengan persentase sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebanyak 10 Lokasi dengan persentase sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.5. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

A.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Wilayah IX Jawa Barat memiliki 10 Terminal Tipe-A yang beroperasi.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang

beroperasi pada Tahun 2022 didukung dengan kegiatan operasional layanan Terminal Tipe-A yang melayani para penumpang yang ingin menggunakan jasa layanan kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Perdesaan.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp. 24.309.647.948,- dari total pagu sebesar Rp. 24.310.514.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.401.208.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.401.042.556,- atau 99,99%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.350.943.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.350.932.246,- atau 100%;
3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.967.519.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.967.313.458,- atau 99,99%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.422.643.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.422.557.316,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.473.184.000,- dan realisasi mencapai Rp. 3.473.168.794,- atau 100%;
6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.612.611.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.612.544.456,- atau 100%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.881.051.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.881.025.811,- atau 100%;
8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.645.401.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.645.373.798,- atau 100%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.380.690.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.380.477.962,- atau 99,98%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.175.264.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.175.211.551,- atau 100%.

A.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Terminal Tipe A secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui

revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Terminal.

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa ticketing online, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara online;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

A.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

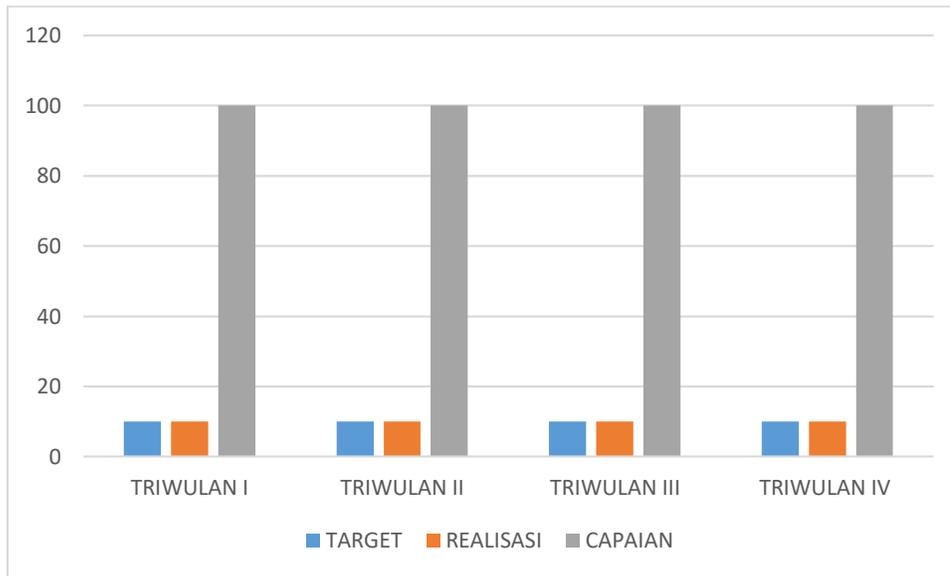
Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2022 sebanyak 10 Lokasi atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 yang tidak terdapat target kinerja mengenai Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2022 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi											
IKK.1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	-	-	100%	10	10	100%	10	10	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

A.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2022 sebanyak 10 lokasi atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebanyak 10 lokasi atau sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.6 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	10	10	10	10
REALISASI	10	10	10	10
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

A.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda

A.4.1 Definisi Indikator Kinerja

Fasilitas Pendukung dan integrasi moda yang terbangun. Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor,

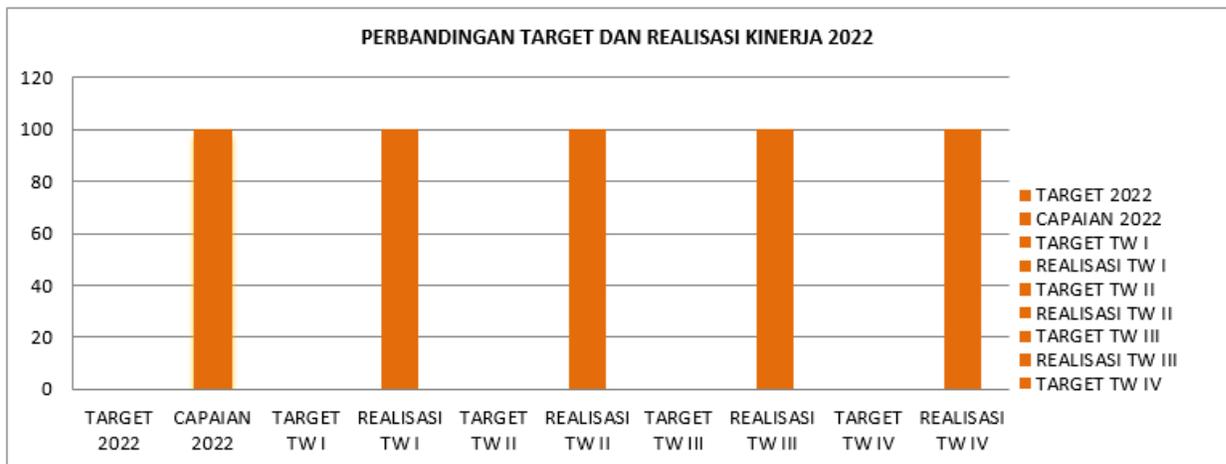
parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \text{Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda}$$

A.4.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.7. Grafik Capaian IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

A.4.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

A.4.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di wilayah Provinsi Jawa Barat.

A.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

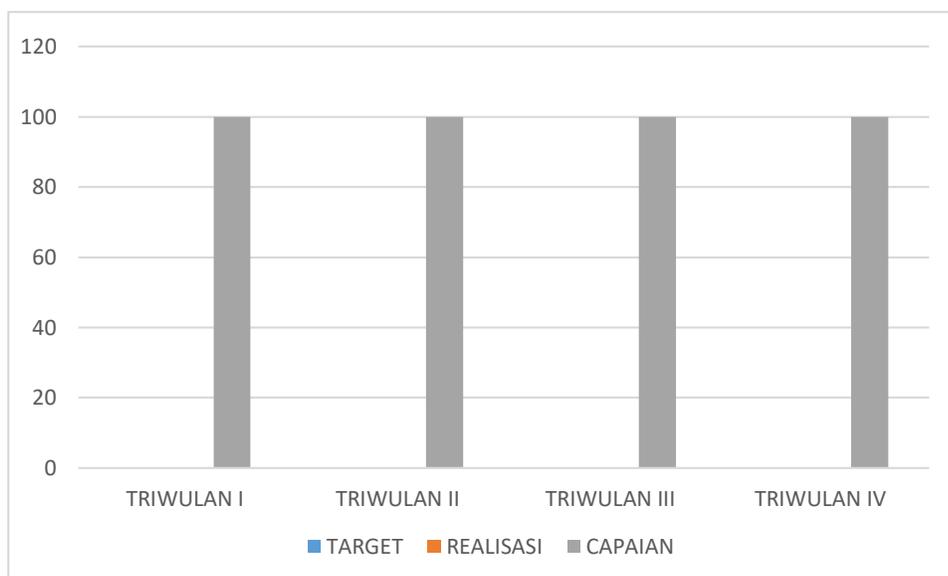
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda baik pada tahun 2020, tahun 2021, maupun tahun 2022. Sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SKI Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi											
IKK.1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

A.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.8 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

A.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

A.5.1 Definisi Indikator Kinerja

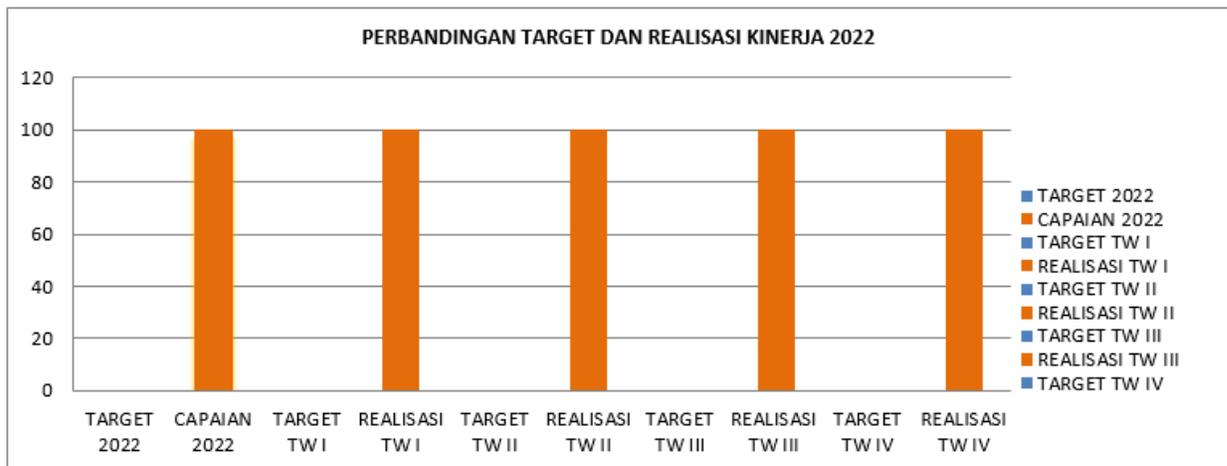
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

A.5.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.9. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

A.5.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

A.5.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

A.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

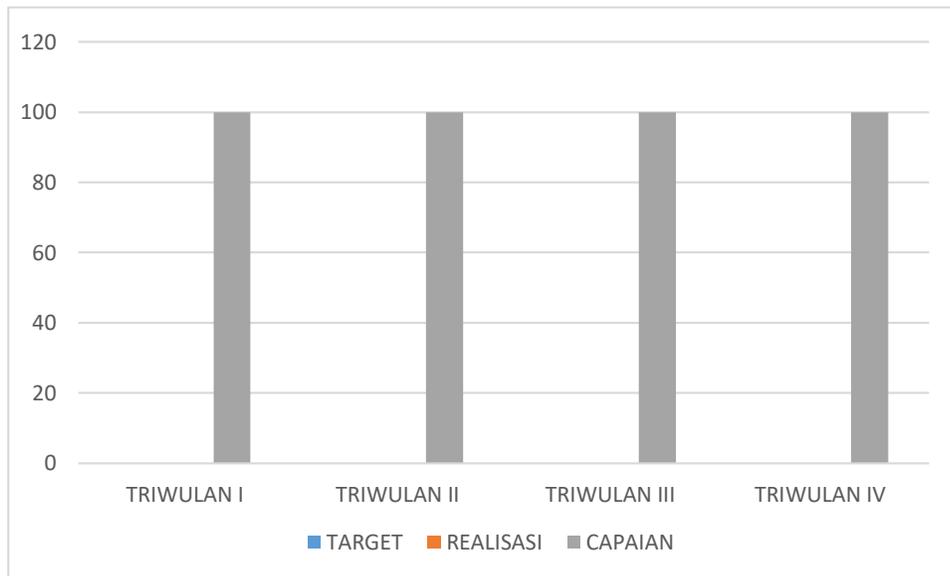
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan baik pada Tahun 2020, Tahun 2021, maupun Tahun 2022. Sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi											
IKK.1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

A.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020 - 2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.10 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

A.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

A.6.1 Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

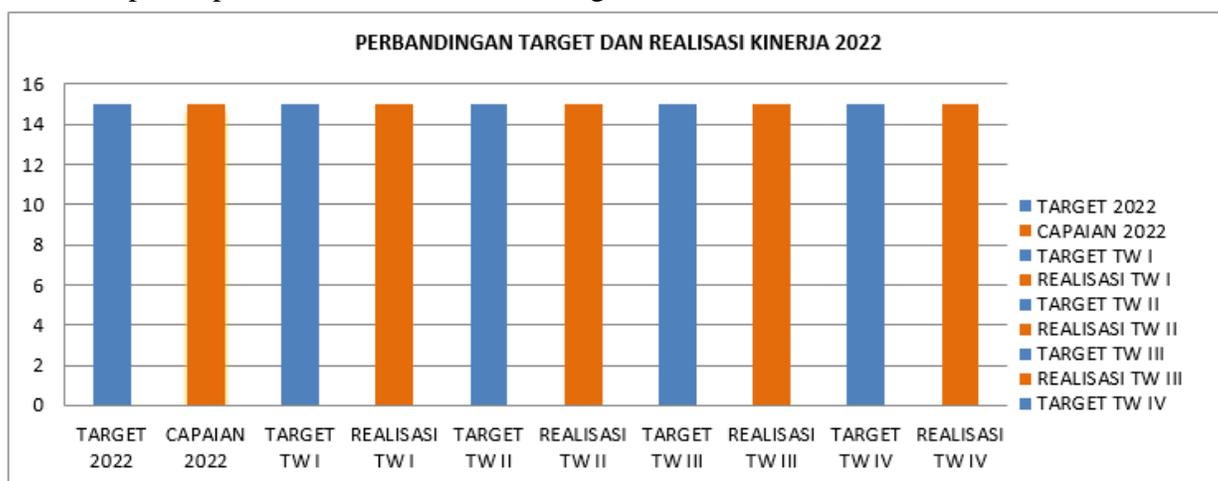
Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)

A.6.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebanyak 15 Lokasi dengan capaian sebanyak 15 Lokasi wilayah kerja, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.11. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

A.6.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, serta munculnya anggaran kegiatan Tahun 2022 pada DIPA/POK BPTD Wilayah IX Jawa Barat. Untuk Tahun 2022 BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk operasional Pelabuhan Penyeberangan di sebanyak 15 lokasi.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2022 didukung dengan kegiatan

operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di 15 Lokasi yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp. 1.272.179.061,- dari total pagu sebesar Rp. 1.272.195.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Bunder (Waduk Saguling) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 243.903.000,- dan realisasi mencapai Rp. 243.893.811,- atau 100%;
2. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Ciputri (Waduk Cirata) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 79.744.000,- dan realisasi mencapai Rp. 79.743.500,- atau 100%;
3. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Jangari) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 73.094.000,- dan realisasi mencapai Rp. 73.094.000,- atau 100%;
4. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Kebon Coklat) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.539.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.538.500,- atau 100%;
5. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Babakan Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.652.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.651.500,- atau 100%;
6. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Cipicung) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.267.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.266.500,- atau 100%;
7. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cisentul dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 67.969.000,- dan realisasi mencapai Rp. 67.968.500,- atau 100%;
8. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sungai Eretan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 76.570.000,- dan realisasi mencapai Rp. 76.569.000,- atau 100%;
9. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Saguling (Maroko) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 75.514.000,- dan realisasi mencapai Rp. 75.513.500,- atau 100%;
10. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau di Bayu Biru (Waduk Jatiluhur) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.379.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.378.500,- atau 100%;

11. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau di Serpis (Waduk Jatiluhur) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.765.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.764.000,- atau 100%;
12. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Jatiluhur dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 65.211.000,- dan realisasi mencapai Rp. 65.210.750,- atau 100%;
13. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kalipucang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.393.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.393.000,- atau 100%;
14. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Majingklak dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 75.006.000,- dan realisasi mencapai Rp. 75.005.500,- atau 100%;
15. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sungai Pamotan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.189.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.188.500,- atau 100%.

Dengan dimulainya penerapan pengawasan pelayanan di 15 Lokasi wilayah kerja TSDP maka pada Tahun 2022 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi walaupun untuk saat ini status pelabuhannya masih dibawah otoritas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang realisasinya pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%.

A.6.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini, kegiatan lingkup TSDP telah didukung dengan anggaran operasionalisasi pengawasan pelayanan untuk 15 lokasi/wilayah kerja. Tentunya ke depan besar harapannya untuk terus kami tingkatkan pelayanannya dengan dukungan anggaran yang bukan hanya operasional pengawasannya namun juga pembangunan Pelabuhan penyeberangannya.

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang cukup memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Pelabuhan SDP secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Pelabuhan SDP.

1. Perbaiki penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP baik berupa dukungan sarana dan prasarannya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Pelabuhan SDP baik berupa ticketing online, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan pelayaran Pelabuhan penyeberangan.

A.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

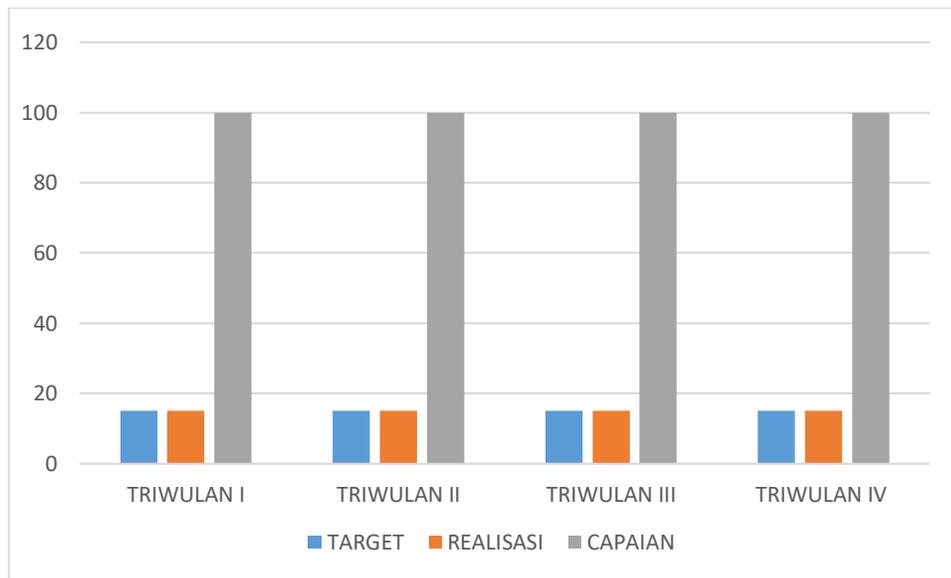
Pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebanyak 15 Lokasi, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terdapat realisasi kinerja untuk indikator kinerja kegiatan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi											
IKK.1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	-	-	100%	-	-	100%	15	15	100%	Terdapat kenaikan

A.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 Tahun 2022 sebanyak 15 lokasi atas indikator kinerja kegiatan jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sehingga capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.12 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	15	15	15	15
REALISASI	15	15	15	15
CAPAIAN	100%	100	100%	100%

B. SK2 MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 2.1. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A;
2. IKK 2.2. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A;
3. IKK 2.3. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP.

B.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

B.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

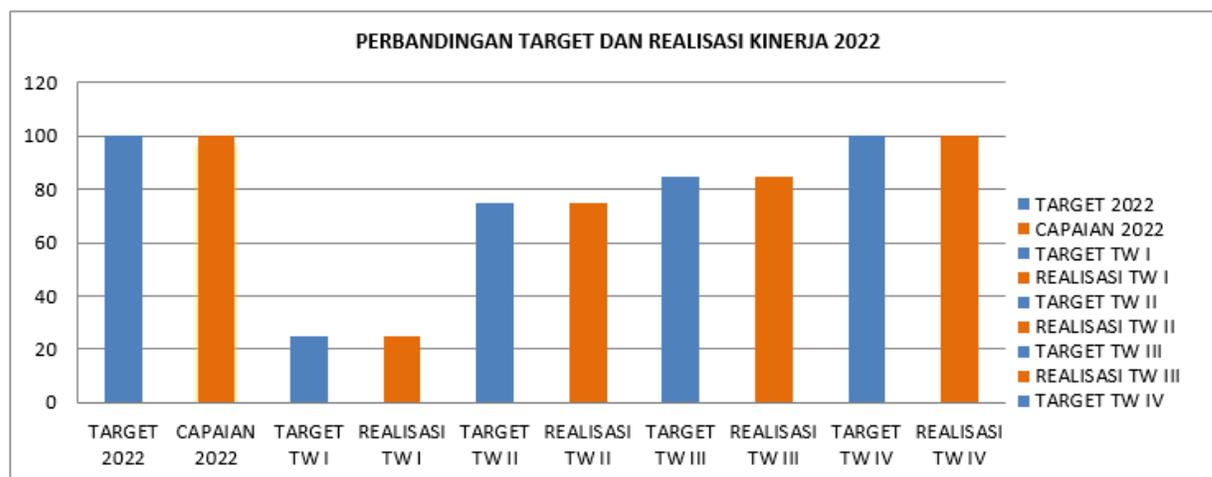
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi Standar Pelayanan}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan}} \times 100\%$$

B.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2022 target sebesar 100% dengan capaian 100%. Pencapaian ini di gambarkan pada Grafik III.12. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	25	25	75	75	85	85	100	100

B.1.3 Analis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%, dimana hal ini ditunjukkan dengan berbagai peningkatan kualitas pelayanan di masing-masing terminal Tipe-A di bawah naungan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah Rp. 24.309.647.948,- dari total pagu sebesar Rp. 24.310.514.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.401.208.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.401.042.556,- atau 99,99%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.350.943.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.350.932.246,- atau 100%;

3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.967.519.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.967.313.458,- atau 99,99%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.422.643.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.422.557.316,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.473.184.000,- dan realisasi mencapai Rp. 3.473.168.794,- atau 100%;
6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.612.611.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.612.544.456,- atau 100%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.881.051.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.881.025.811,- atau 100%;
8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.645.401.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.645.373.798,- atau 100%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.380.690.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.380.477.962,- atau 99,98%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.175.264.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.175.211.551,- atau 100%.

B.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Terminal Tipe-A secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Terminal.

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Tipe A melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbaiki penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara *online*;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 , Tahun 2021, dan Tahun 2022

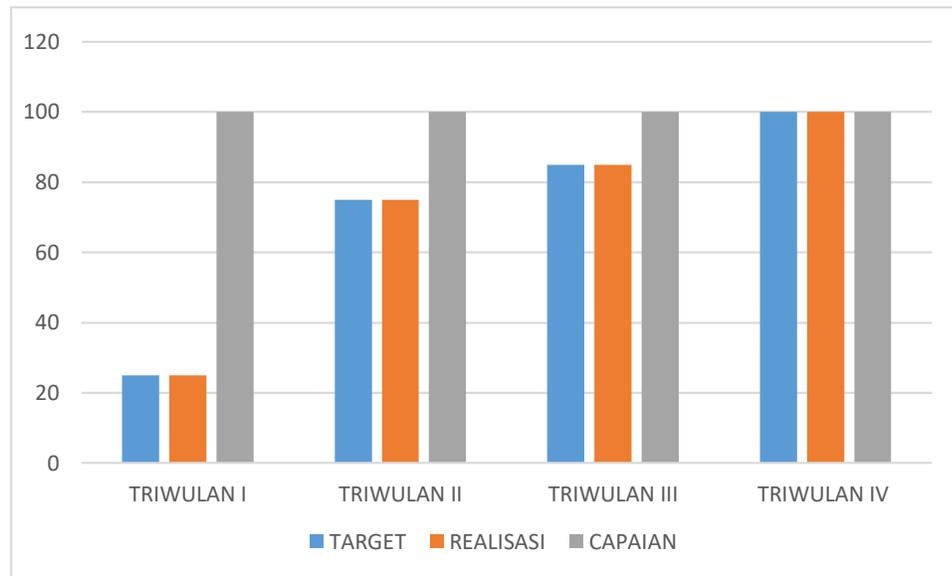
Realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2022 mencapai 100 % sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terdapat realisasi kinerja untuk indikator kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat											
IKK.2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	Terdapat kenaikan

B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 terdapat target kinerja pada Tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.13 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	25	75	85	100
REALISASI	25	75	85	100
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

B.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

B.2.1 Definisi Indikator Kinerja

Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

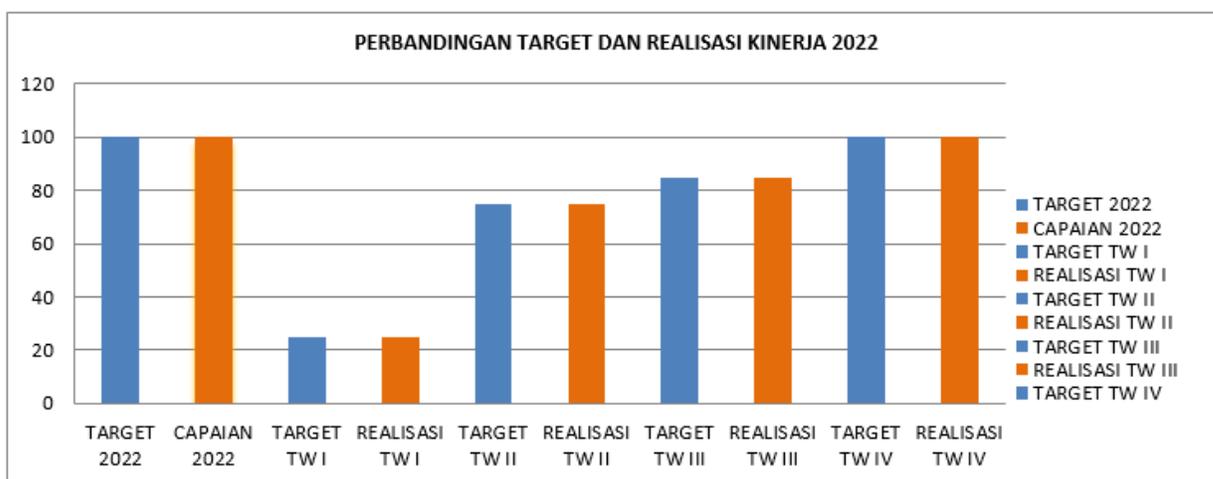
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasionalnya secara online}}{\text{Jumlah Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

= (Persentase TTA Online x 50 %) + (Persentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal)

B.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2022 sebesar 85% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.14. Grafik Capaian IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	25	25	75	75	85	85	100	100

B.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%, dimana hal ini ditunjukkan dengan

berbagai peningkatan kualitas pelayanan di masing-masing terminal Tipe-A di bawah naungan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi Rp. 24.309.647.948,- dari total pagu sebesar Rp. 24.310.514.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.401.208.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.401.042.556,- atau 99,99%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.350.943.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.350.932.246,- atau 100%;
3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.967.519.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.967.313.458,- atau 99,99%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.422.643.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.422.557.316,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.473.184.000,- dan realisasi mencapai Rp. 3.473.168.794,- atau 100%;
6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.612.611.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.612.544.456,- atau 100%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.881.051.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.881.025.811,- atau 100%;
8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.645.401.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.645.373.798,- atau 100%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.380.690.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.380.477.962,- atau 99,98%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.175.264.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.175.211.551,- atau 100%.

B.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Terminal Tipe-A secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Terminal.

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Tipe A melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbaiki penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarannya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara *online*;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A melalui Pembiayaan Operasional Terminal Tipe-A yang dikelola, Pelayanan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A berdampak pada terlaksananya pelayanan transportasi darat yang memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Barat dengan upaya peningkatan pelayanan berupa modernisasi sistem pelayanan transportasi darat (pengembangan sistem informasi berbasis internet dan penerapan pelayanan berbasis teknologi) di tahun-tahun yang akan datang.

B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

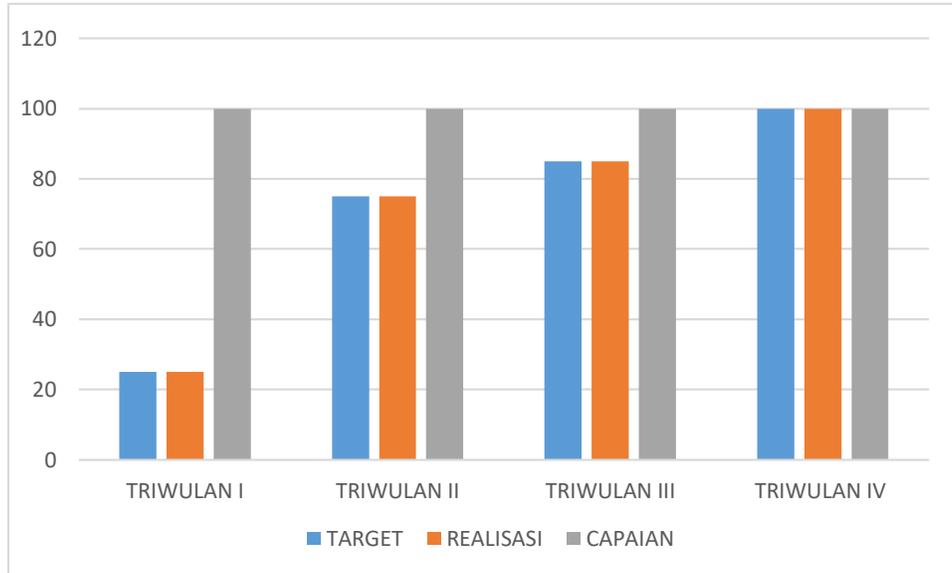
Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2021 ini mempunyai persentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat											
IKK.2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan
IKK 1.1	Penyusunan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan, Penyelenggaraan dan Pengawasan Terminal Penumpang Tipe A	100	100	100%	-	-	-	-	-	-	

B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja presentase penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.15 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	25	75	85	100
REALISASI	25	75	85	100
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

B.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

B.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe,

Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

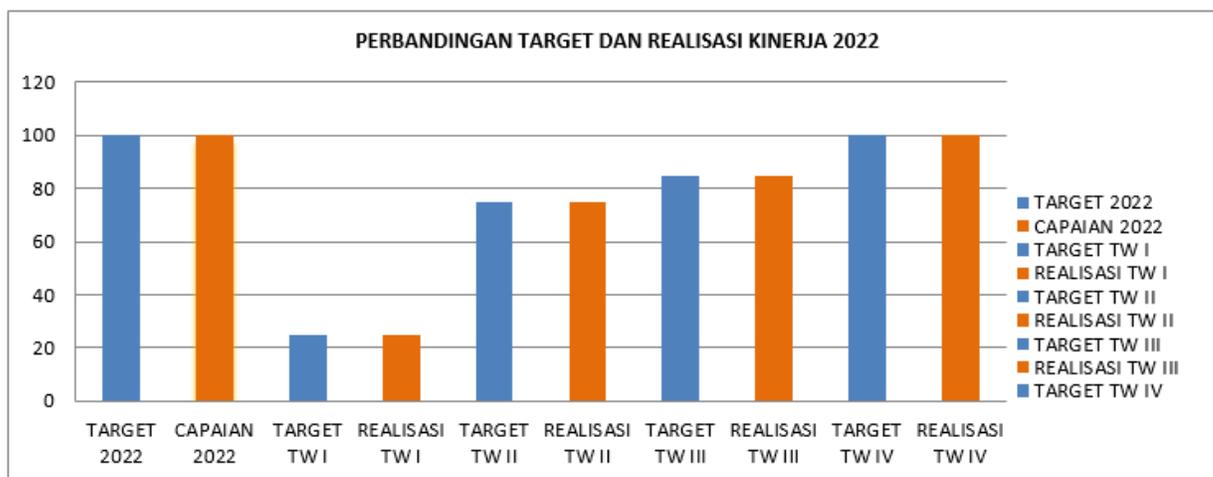
Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dipantau}} \times 100\%$$

B.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.16. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	25	25	75	75	85	85	100	100

B.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan, hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan yang memiliki standar pelayanan minimum Pelabuhan penyeberangan, namun mulai Tahun 2022 ini pemantauan SPM mulai digencarkan dengan melibatkan BPTD. Untuk BPTD Wilayah IX Jawa Barat sendiri saat ini tengah diamanatkan 15 lokasi wilayah kerja Pelabuhan penyeberangan untuk dipantau secara langsung SPM Pelabuhan Penyeberangannya meskipun saat ini statusnya masih tercatat sebagai UPT di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP didukung dengan kegiatan Pembiayaan Operasional Pengawasan Wilayah Kerja TSDP.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{15}{15} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp. 1.272.179.061,- dari total pagu sebesar Rp. 1.272.195.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Bunder (Waduk Saguling) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 243.903.000,- dan realisasi mencapai Rp. 243.893.811,- atau 100%;
2. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Ciputri (Waduk Cirata) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 79.744.000,- dan realisasi mencapai Rp. 79.743.500,- atau 100%;
3. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Jangari) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 73.094.000,- dan realisasi mencapai Rp. 73.094.000,- atau 100%;

4. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Kebon Coklat) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.539.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.538.500,- atau 100%;
5. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Babakan Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.652.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.651.500,- atau 100%;
6. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Cipicung) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.267.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.266.500,- atau 100%;
7. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cisentul dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 67.969.000,- dan realisasi mencapai Rp. 67.968.500,- atau 100%;
8. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sungai Eretan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 76.570.000,- dan realisasi mencapai Rp. 76.569.000,- atau 100%;
9. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Saguling (Maroko) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 75.514.000,- dan realisasi mencapai Rp. 75.513.500,- atau 100%;
10. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau di Bayu Biru (Waduk Jatiluhur) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.379.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.378.500,- atau 100%;
11. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau di Serpis (Waduk Jatiluhur) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.765.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.764.000,- atau 100%;
12. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Jatiluhur dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 65.211.000,- dan realisasi mencapai Rp. 65.210.750,- atau 100%;
13. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kalipucang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.393.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.393.000,- atau 100%;
14. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Majingklak dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 75.006.000,- dan realisasi mencapai Rp. 75.005.500,- atau 100%;
15. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sungai Pamotan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.189.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.188.500,- atau 100%.

B.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini, kegiatan lingkup TSDP telah didukung dengan anggaran operasional pengawasan pelayanan untuk 15 lokasi/wilayah kerja. Tentunya ke depan besar harapannya untuk terus kami tingkatkan pelayanannya dengan dukungan anggaran yang bukan hanya operasional pengawasannya namun juga pembangunan Pelabuhan penyeberangannya.

Dari hasil capaian kinerja Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang cukup memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Pelabuhan SDP secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Pelabuhan SDP.

BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan operasional Pelabuhan SDP melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Pelabuhan SDP baik berupa ticketing online, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan pelayaran Pelabuhan penyeberangan.

B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

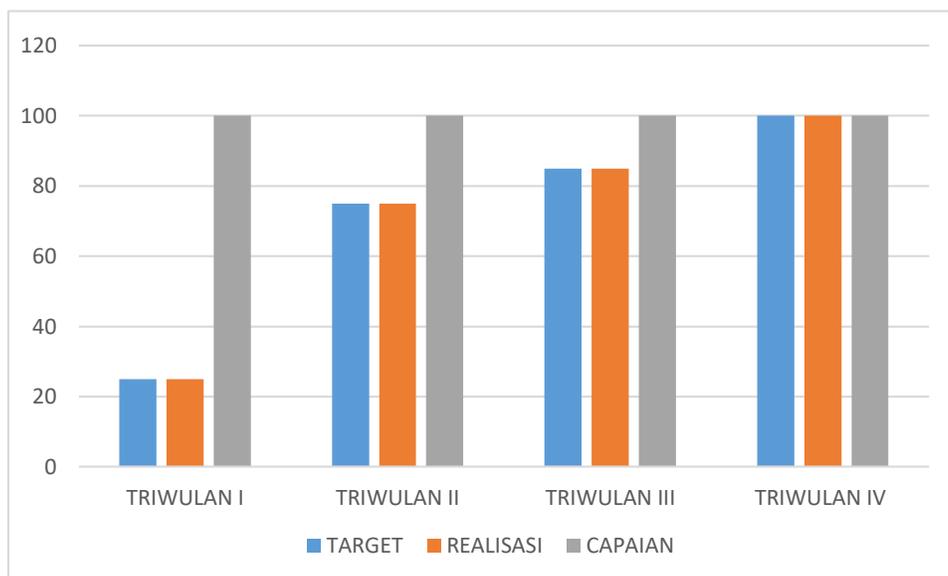
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat realisasi kinerja tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat											
IKK.2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	-	-	100%	-	-	100%	100	100	100%	Terdapat kenaikan

B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada tahun 2020 maupun tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 terdapat target kinerja sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.17 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	25	75	85	100
REALISASI	25	75	85	100
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

C. SK4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan;
4. IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif;

5. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
6. IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UN-ECE*)*;
7. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

C.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

C.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi :

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

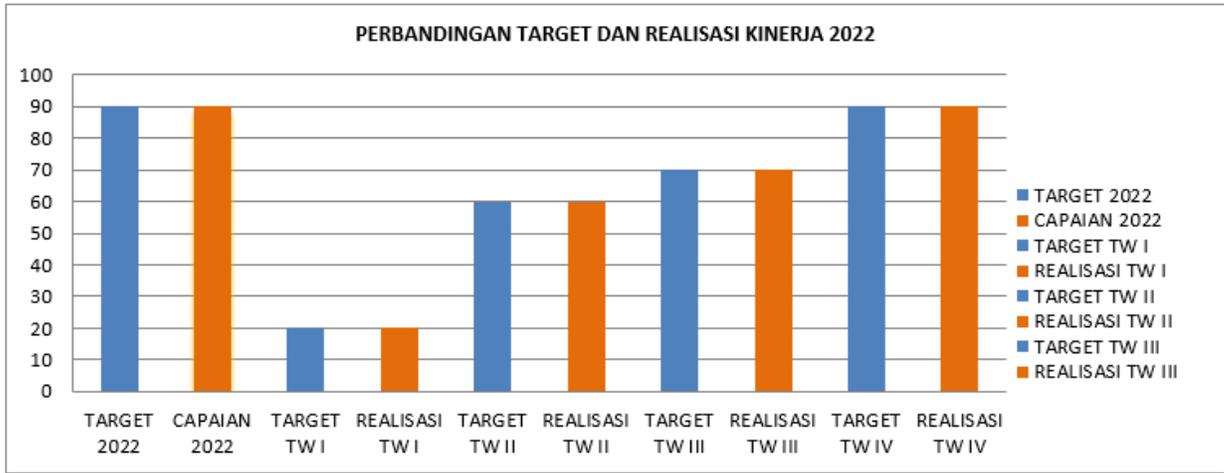
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang pada Tahun 2022}}{\text{Persentase Perlengkapan Jalan sesuai kondisi ideal pada Tahun 2022}} \times 100\%$$

C.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2022 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini

digambarkan pada Grafik III.18. Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
90	90	20	20	60	60	70	70	90	90

C.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 90% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{90\%}{90\%} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp. 10.222.381.459 dari total pagu sebesar Rp. 10.222.718.000 atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Bantuan teknis perlengkapan jalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.491.259.000,- dan realisasi s/d Tahun 2022 mencapai Rp. 2.491.259.000,- atau 100%;

2. Perlengkapan Jalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 7.731.459.000,- dan realisasi s/d Tahun 2022 mencapai Rp. 7.731.122.459,- atau 100%.

Realisasi anggaran masih menunjukkan 71,46% namun capaian presentase perlengkapan menunjukkan 100% ini menandakan bahwa presentase perlengkapan jalan yang terpasang sudah menunjukkan angka yang cukup, sehingga ketika kegiatan bantuan teknis maupun pemasangan perlengkapan jalan dilaksanakan 2022 diharapkan dapat semakin meningkatkan presentase perlengkapan jalan menuju kondisi ideal.

C.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Sesuai amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 25 disebutkan bahwa “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan”.
Perlengkapan jalan untuk :

- a. Jalan Nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat;
- b. Jalan Provinsi merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten/ kota dan jalan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- d. Jalan Tol menjadi tanggungjawab badan usaha jalan tol.

Dari hasil capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja yang baik meskipun belum didukung dengan realisasi anggaran yang masih terkendala adanya perubahan juklak/juknis pengadaan perlengkapan jalan.

BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang menuju kondisi ideal melalui upaya :

1. Melaksanakan percepatan pengadaan bantuan teknis perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan di Jawa Barat yang berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ di tahun-tahun yang akan datang;
2. Mendukung upaya perbaikan kualitas pengadaan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi pemasangan perlengkapan jalan guna menunjang pemetaan pemasangan di titik-titik yang merupakan prioritas jalan nasional.

C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

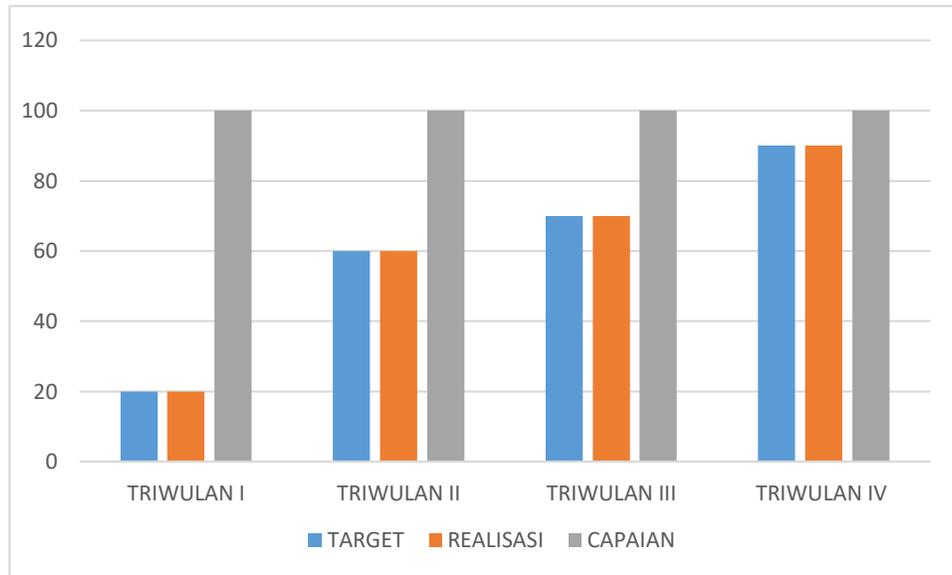
Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2021 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2022 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel III.10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Relisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK.3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	-	-	-	80%	80%	100%	90%	90%	100%	Terdapat kenaikan
IKK 4	Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	100	100	100%	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan
IKK 5	Penyusunan Bahan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100	100	100%	-	-	-	-	-	-	

C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja presentase Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2021 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Tepasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2022 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.20 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	20	60	70	90
REALISASI	20	60	70	90
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

C.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

C.2.1 Definisi Indikator Kinerja

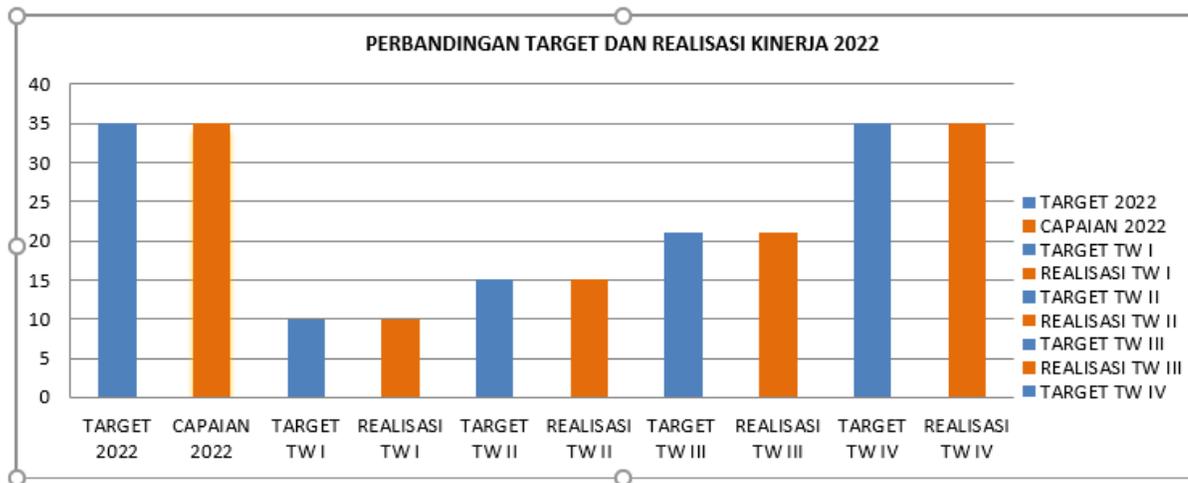
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran pada UPPKB di BPTD Wilayah IX Jawa Barat Tahun 2022}}{\text{Jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk pada UPPKB di BPTD Wilayah IX Jawa Barat Tahun 2022}} \times 100\%$$

C.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 35%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.21. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
35	35	10	10	15	15	21	21	35	35

C.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang diperkuat dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan bahwa UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 memiliki persentase capaian sebesar 35% yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran kendaraan yang memasuki area UPPKB masih relatif tinggi.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{35\%}{35\%} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp. 5.508.030.000,- dari total pagu sebesar Rp. 5.527.380.000,- atau sebesar 99,64 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional UPPKB Balonggandu dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.266.447.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.266.329.247,- atau 99,99%;
2. Operasional UPPKB Losarang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 910.322.000,- dan realisasi mencapai Rp. 910.230.240,- atau 99,99%;
3. Operasional UPPKB Gentong dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 823.659.000,- dan realisasi mencapai Rp. 823.650.998,- atau 100%;
4. Operasional UPPKB Tomo dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 897.949.000,- dan realisasi mencapai Rp. 879.943.614,- atau 100%;
5. Operasional UPPKB Cibaragalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 421.436.000,- dan realisasi mencapai Rp. 420.363.546,- atau 99,75%;

6. Operasional UPPKB Kemang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 800.899.000,- dan realisasi mencapai Rp. 800.887.225,- atau 100%;
7. Operasional UPPKB Sindangrasa dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 196.934.000,- dan realisasi mencapai Rp. 196.909.778,- atau 99,99%;
8. Operasional UPPKB Bojong dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 209.734.000,- dan realisasi mencapai Rp. 209.715.947,- atau 99,99%.

C.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja yang kurang memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja untuk senantiasa bisa menurunkan angka persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat melalui upaya :

1. Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi peraturan terkait kepada para pengusaha jasa angkutan barang, dll untuk menekan jumlah pelanggaran;
2. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan patroli/piket serta kegiatan penegakan hukum lainnya untuk mendorong efektifitas kegiatan gakum serta memberikan efek jera kepada kendaraan yang masih melakukan pelanggaran;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan penindakan pelanggaran pada UPPKB di lingkungan BPTD Wilayah IX Jawa Barat.

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

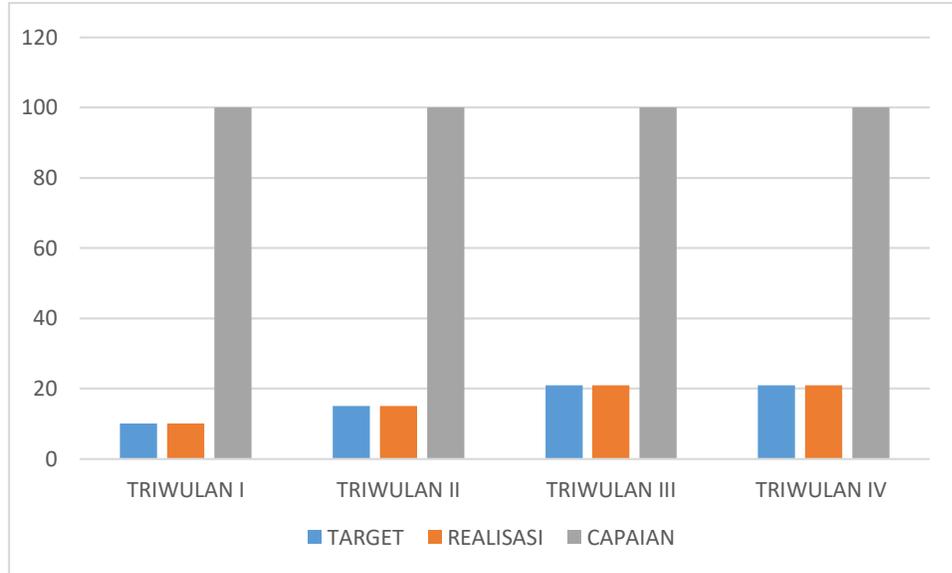
Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang Tahun 2021 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 sebesar 21% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 sebesar 21% maka capaian kinerja mencapai 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel III.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK.3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	-	-	-	35%	35%	100%	35%	35%	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja presentase Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 sebesar 21% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 21% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.22 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	10	15	21	21
REALISASI	10	15	21	21
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

C.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan

C.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan.

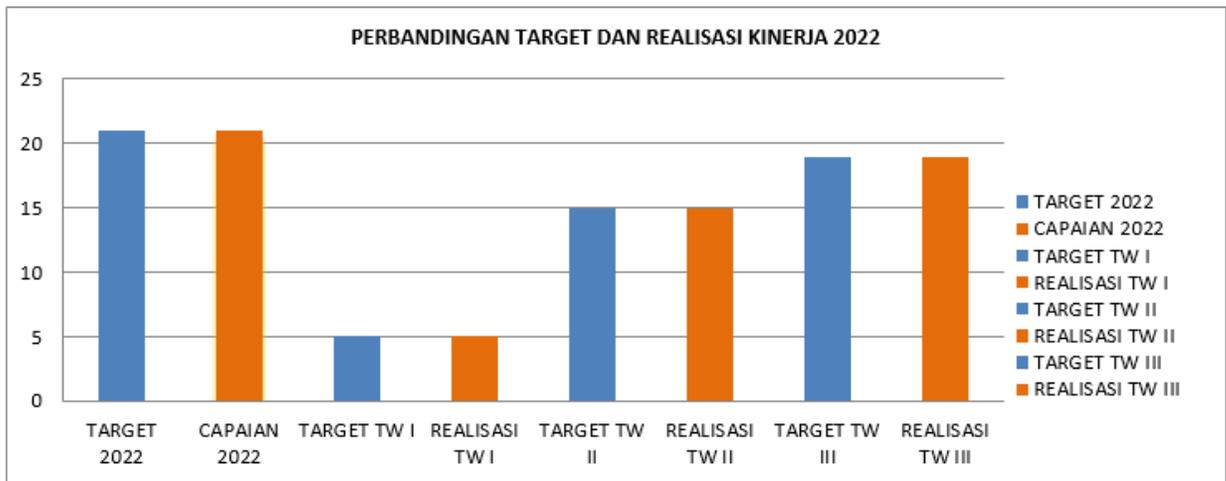
Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, Dan Batas Kecepatan dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun (n)

C.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan Tahun 2022 sebanyak 21 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebanyak 21 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.23. Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan.



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
21	21	5	5	15	15	19	19	21	21

C.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Perdirjen Hubdat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah melalui penyediaan Zona Selamat Sekolah disebutkan bahwa ZoSS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, Dan Batas Kecepatan pada Tahun 2022 memiliki capaian sebanyak 21 lokasi.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{21}{21} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp.2.802.185.733,- dari total pagu sebesar Rp. 2.802.215.000,- atau sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Zona Selamat Sekolah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.802.215.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.802.185.733,- atau 100%.

C.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun Anggaran 2022 yang menunjukkan realisasi yang belum maksimal, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan penyediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun Anggaran 2022 melalui kegiatan pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di sejumlah titik lokasi di wilayah Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ berupa penyediaan kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi / memberikan edukasi kepada para stakeholders terkait mengenai pentingnya manajemen keselamatan lalu lintas angkutan jalan di lingkungan sekitar sekolah yang mempunyai traffic pengguna kendaraan yang cukup tinggi;
2. Melaksanakan evaluasi penentuan titik ZoSS guna efektifitas pelaksanaannya;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan pembangunan ZoSS.

C.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, Dan Batas Kecepatan sebanyak 21 lokasi atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 21 lokasi atau sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja tahun 2022 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 100%.

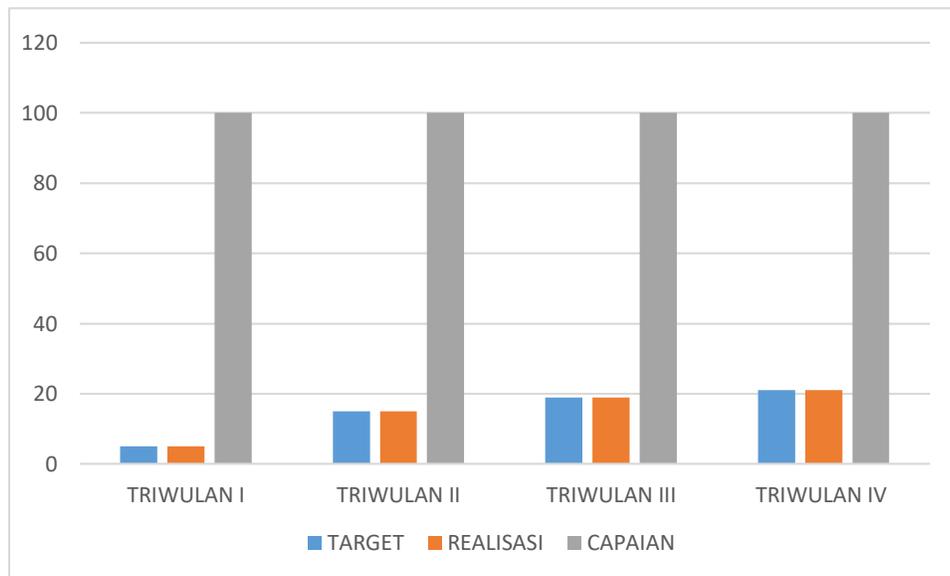
Sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat target kinerja. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK.3.3	Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan	-	-	-	21	21	100%	21	21	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan Tahun 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan Tahun 2022 sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.24 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	5	15	19	21
REALISASI	5	15	19	21
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

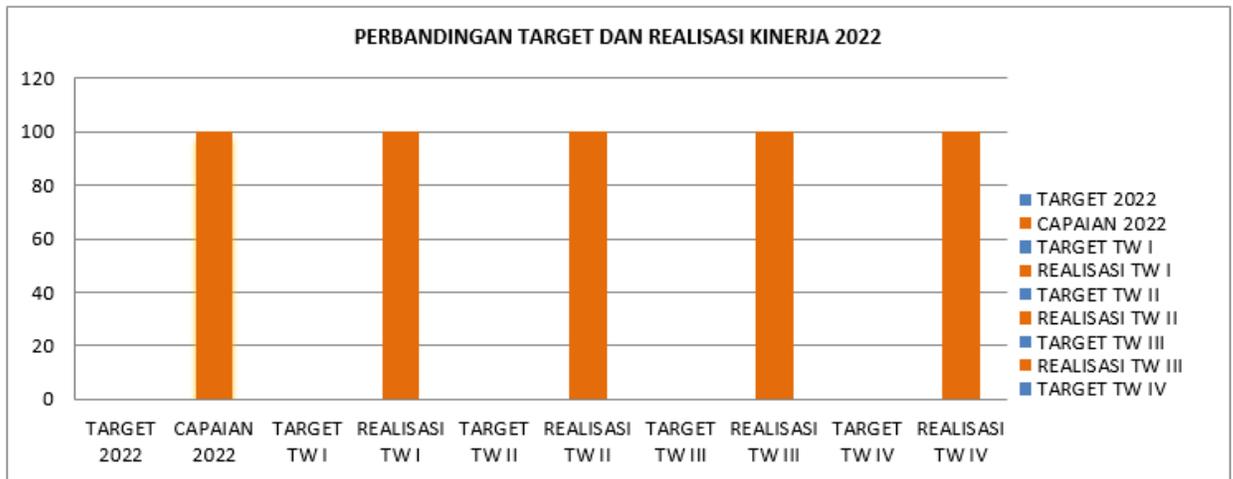
C.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

C.4.1 Definisi Indikator Kinerja

Taman edukatif keselamatan transportasi darat merupakan taman fasilitas umum, berbentuk miniature prasarana dan sarana lalu lintas jalan, kereta api, dan angkutan sungai danau yang dilengkapi dengan ruang display fasilitas dan tata cara lalu lintas jalan, kereta api dan angkutan sungai danau. Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

C.4.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan jumlah ketersediaan taman edukatif maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.25. Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan taman edukatif.



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

C.4.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

C.4.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif, namun BPTD Wilayah IX

Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif di wilayah Provinsi Jawa Barat

C.4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

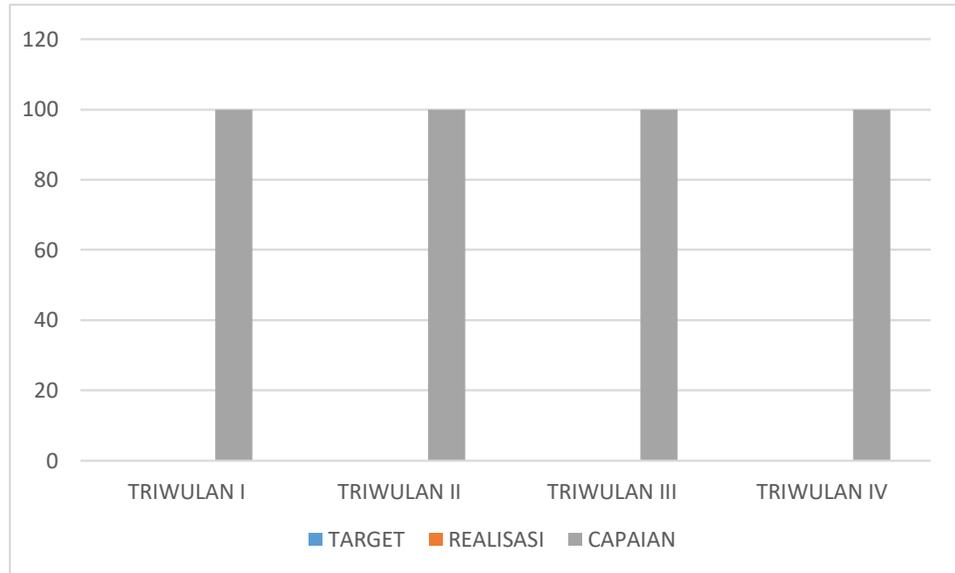
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif baik pada tahun 2020, tahun 2021, maupun tahun 2022. Sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK.3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.4.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.26 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

C.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

C.5.1 Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam ber transportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut:

= Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ

C.5.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 0% dikarenakan sedang menunggu proses revisi sumber dana kegiatan. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.27. Grafik Capaian IKK jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan.



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C.5.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 0% dikarenakan kegiatan belum dilaksanakan (revisi sumber dana telah berhasil dilaksanakan namun menjadi salah satu dana yang terkena *Automatic Adjustment*).

C.5.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Apabila terdapat pembukaan blokir anggaran, kami akan segera melaksanakan kegiatan tersebut untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Adapun beberapa upaya yang akan kami laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi kepada para stakeholders terkait mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan pekan nasional keselamatan angkutan jalan;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

C.5.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

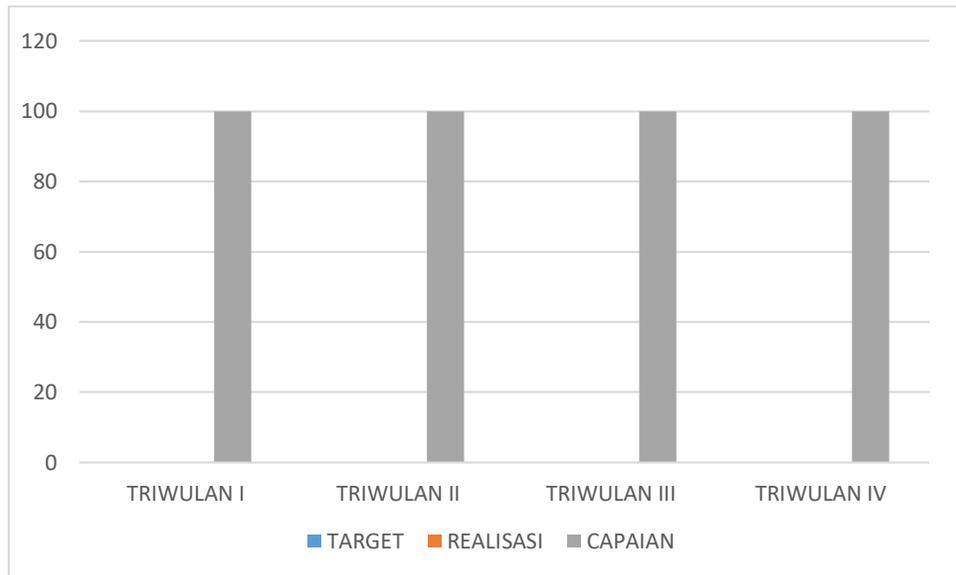
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan baik pada tahun 2020, tahun 2021, maupun tahun 2022. Sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK.3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.5.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.28 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

C.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

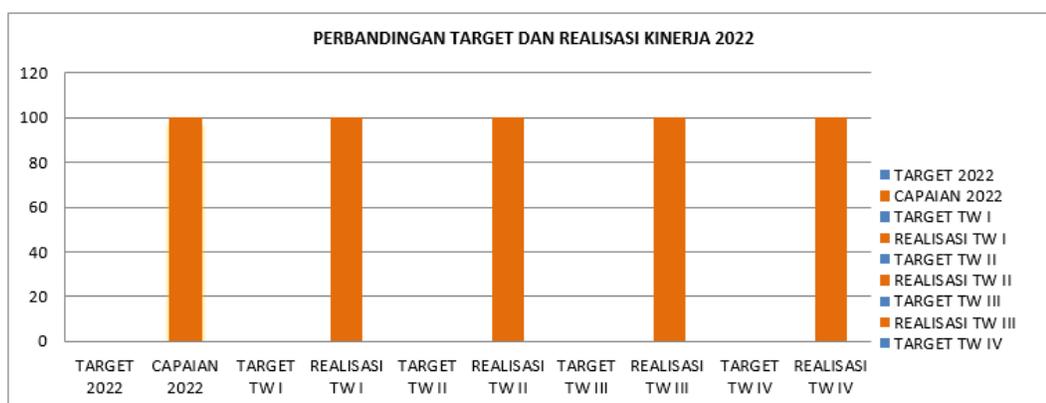
C.6.1 Definisi Indikator Kinerja

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang sesuai standar Internasional di wilayah BPTD IX Jawa Barat Tahun 2022}}{\text{Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah BPTD IX Jawa Barat Tahun 2022}} \times 100 \%$$

C.6.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UN-ECE*)* maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.29. Grafik Capaian IKK Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UN-ECE*)*.



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

C.6.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UN-ECE*)* pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

C.6.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UN-ECE*)*, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan pengadaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UN-ECE*)* di wilayah Provinsi Jawa Barat.

C.6.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2023

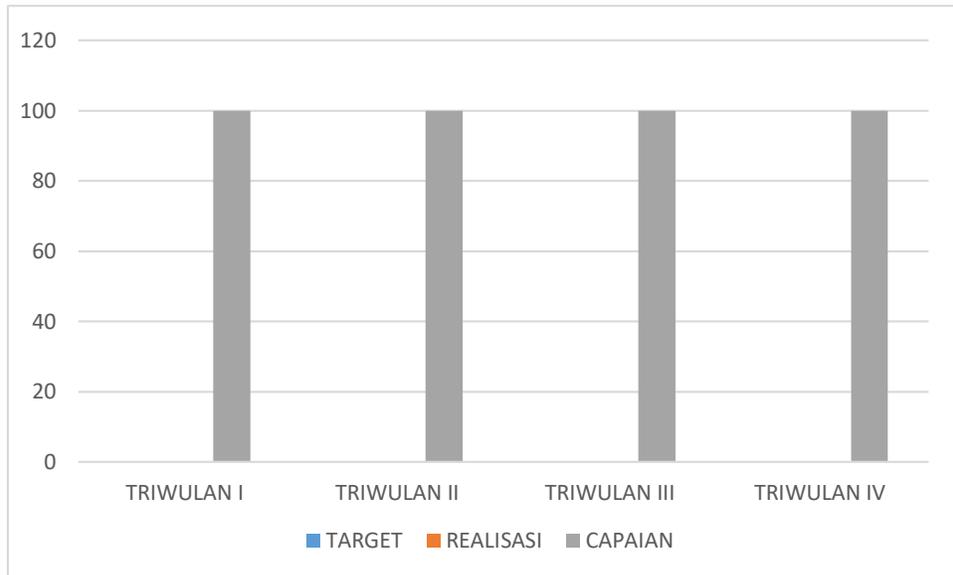
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UN-ECE*)* baik pada tahun 2020, tahun 2021, maupun tahun 2022. Sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.15 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK.3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (<i>UN-ECE</i>)*	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.6.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UNECE*)* capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.30 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

C.7 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

C.7.1 Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun

ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

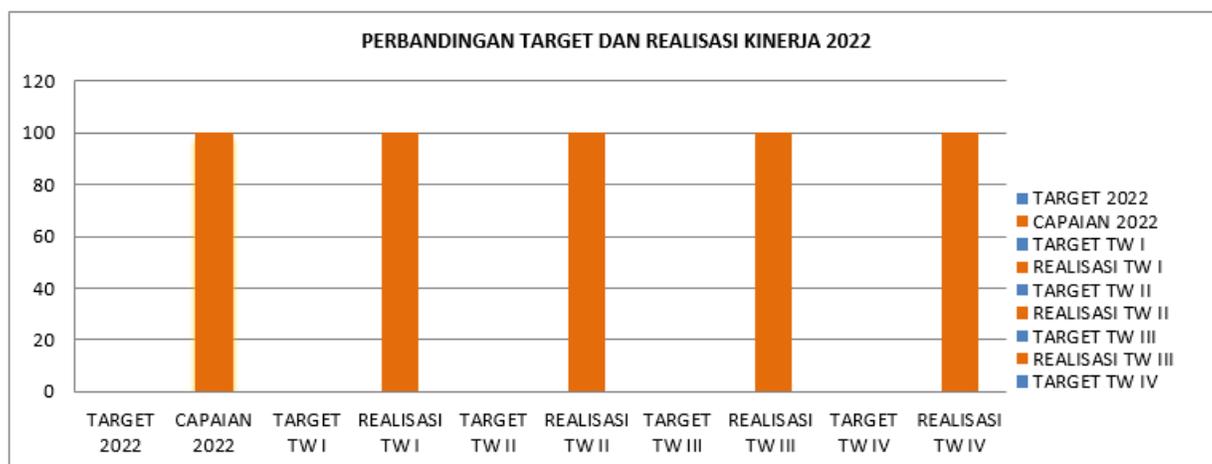
Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda DKI Jakarta, Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun n}}{\text{Jumlah Pemda (DKI Jakarta+Kota+Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

C.7.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.31. Grafik Capaian IKK Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

C.7.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

C.7.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jawa Barat

C.7.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

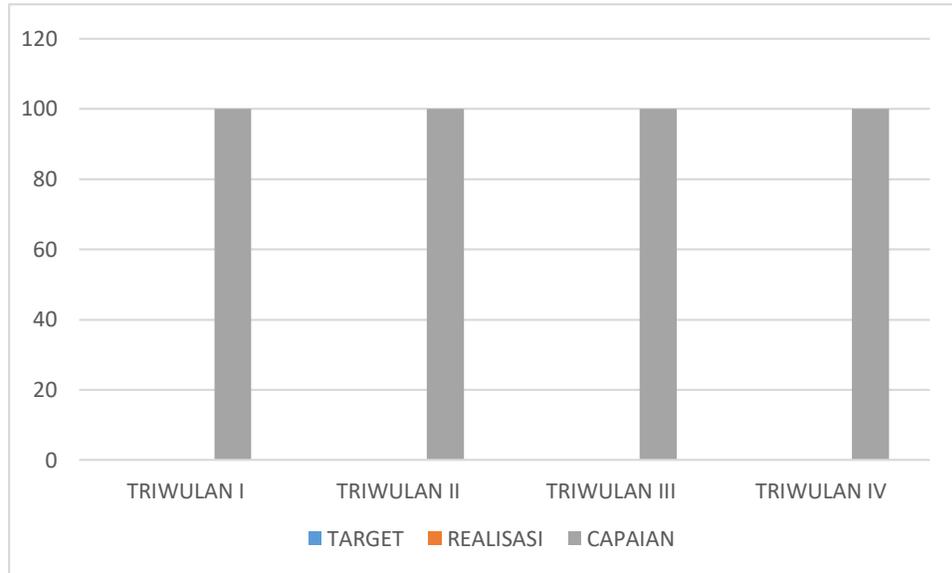
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor baik pada tahun 2020, tahun 2021, maupun tahun 2022. Sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.7.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.32 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

C.8 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

C.8.1 Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayani.

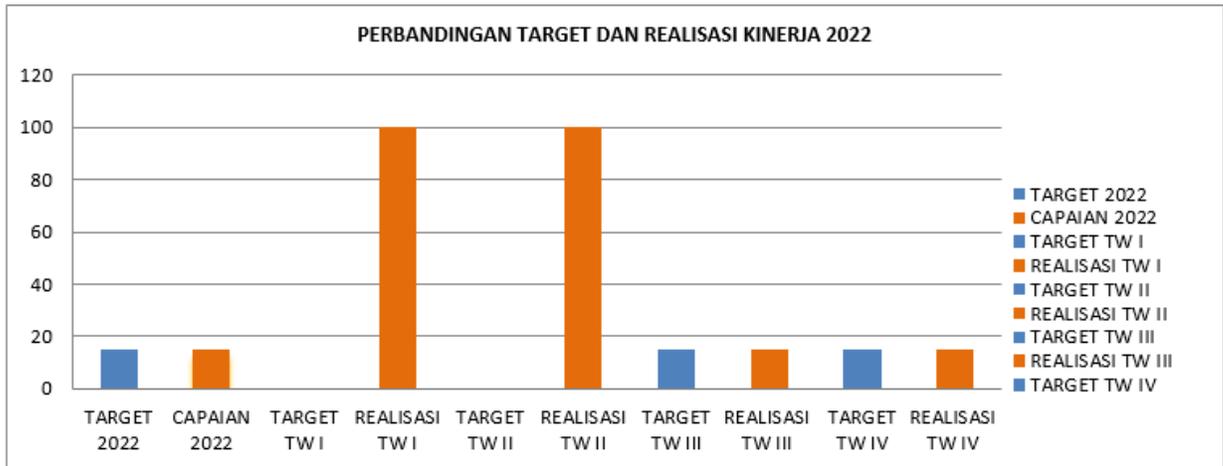
Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n)

C.8.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Triwulan I dan Triwulan II tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP, namun pada Triwulan III, dan Triwulan IV terdapat target kinerja atas kinerja kegiatan jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebanyak 15 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.33. Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
15	15	0	100	0	100	15	15	15	15

C.8.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada Tahun 2022 didukung dengan kegiatan operasional layanan SDP terhadap 15 lokasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang berada di Provinsi Jawa Barat, namun tetap kewenangan berada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Hal ini, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor UM.006/4/20/DRJD/2021 tanggal 20 Mei 2022 perihal Pelaksanaan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP, adanya

peraturan Menteri yang baru bahwa surat persetujuan berlayar yang sebelumnya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) dialihkan kewenangannya ke Dirjen Perhubungan Darat c.q. Balai Pengelola Transportasi Darat.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur SDP pada Triwulan IV Tahun 2022 memiliki persentase sebesar 99,99%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur SDP Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi terealisasi sebanyak Rp. 1.272.179.061,- dari total pagu sebesar Rp. 1.272.195.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Bunder (Waduk Saguling) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 243.903.000,- dan realisasi mencapai Rp. 243.893.811,- atau 100%;
2. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Ciputri (Waduk Cirata) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 79.744.000,- dan realisasi mencapai Rp. 79.743.500,- atau 100%;
3. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Jangari) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 73.094.000,- dan realisasi mencapai Rp. 73.094.000,- atau 100%;
4. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Kebon Coklat) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.539.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.538.500,- atau 100%;
5. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Babakan Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.652.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.651.500,- atau 100%;
6. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cirata (Cipicung) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.267.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.266.500,- atau 100%;
7. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Cisentul dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 67.969.000,- dan realisasi mencapai Rp. 67.968.500,- atau 100%;
8. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sungai Eretan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 76.570.000,- dan realisasi mencapai Rp. 76.569.000,- atau 100%;
9. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Saguling (Maroko) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 75.514.000,- dan realisasi mencapai Rp. 75.513.500,- atau 100%;
10. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau di Bayu Biru (Waduk Jatiluhur) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.379.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.378.500,- atau 100%;

11. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau di Serpis (Waduk Jatiluhur) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.765.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.764.000,- atau 100%;
12. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Jatiluhur dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 65.211.000,- dan realisasi mencapai Rp. 65.210.750,- atau 100%;
13. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kalipucang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 77.393.000,- dan realisasi mencapai Rp. 77.393.000,- atau 100%;
14. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Majingklak dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 75.006.000,- dan realisasi mencapai Rp. 75.005.500,- atau 100%;
15. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sungai Pamotan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 68.189.000,- dan realisasi mencapai Rp. 68.188.500,- atau 100%.

C.8.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Triwulan III, dan Trwiulan IV Tahun 2022. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebanyak 15 lokasi. Dalam hal ini, BPTD IX Jawa Barat hanya memiliki fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Dari hasil capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan administrasi secara berkala terkait dokumen kapal yang bersangkutan, bukti pembayaran PNBPN sampai manifest keberangkatan kapal.
2. Diberikannya edukasi tentang pentingnya mengikuti SOP keselamatan kapal bagi setiap kapal yang akan berlayar. Keselamatan kapal terdiri atas konstruksi dan permesinan, alat komunikasi dan navigasi, alat keselamatan seperti *life jacket*, *life boat*, alat pemadam kebakaran. Termasuk muatannya jangan sampai melebihi beban dan pelashingan/pengikatan kendaraan.

C.8.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

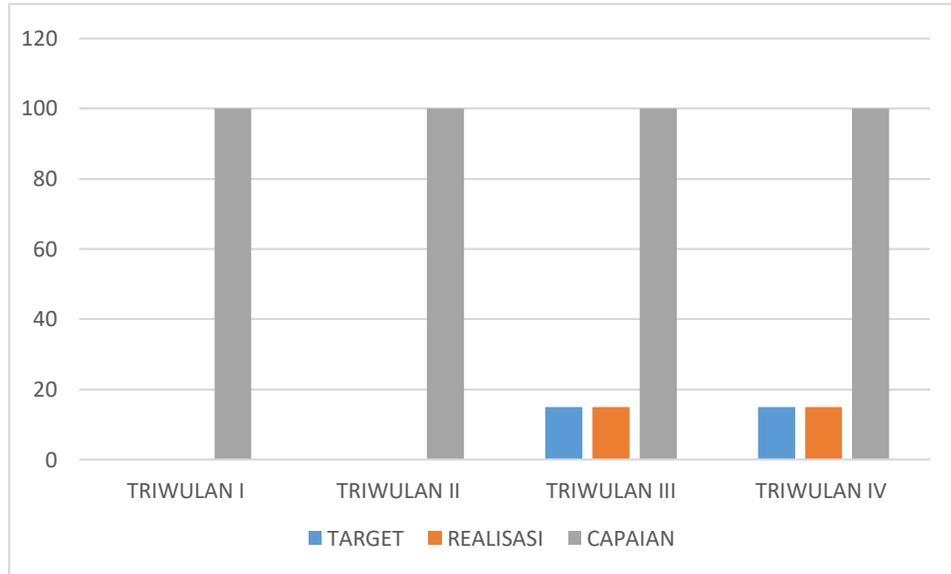
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Namun, pada tahun 2022 di triwulan 3 dan triwulan 4 terdapat indikator ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebanyak 15 lokasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.17 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	-	-	100%	-	-	100%	15	15	100%	Terdapat kenaikan

C.8.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.34 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	15	15
REALISASI	0	0	15	15
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

D. SK5 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 5.1. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

D.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

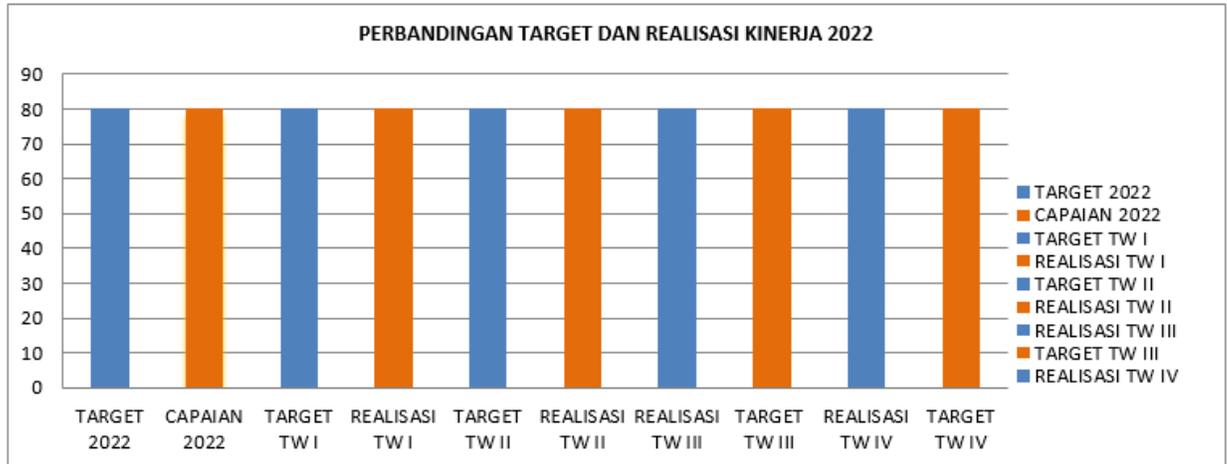
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi *e-performance*.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

D.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan nilai 80 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.35. Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	REALISASI TW III	TARGET TW III	REALISASI TW IV	TARGET TW IV
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

D.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan dukungan teknis.

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan IV Tahun 2022 mempunyai nilai 80. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah memenuhi target yang ditetapkan

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp. 5.051.912.878,- dari total pagu sebesar Rp. 5.052.056.000,- atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 5.051.912.878,- dan realisasi mencapai Rp. 5.052.056.00,- atau 100%;

D.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Triwulan IV Tahun 2022 ini Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan selalu terus berupaya meningkatkan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat melalui :

1. Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi kepada para pegawai tentang pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan dukungan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan teknis;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

D.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

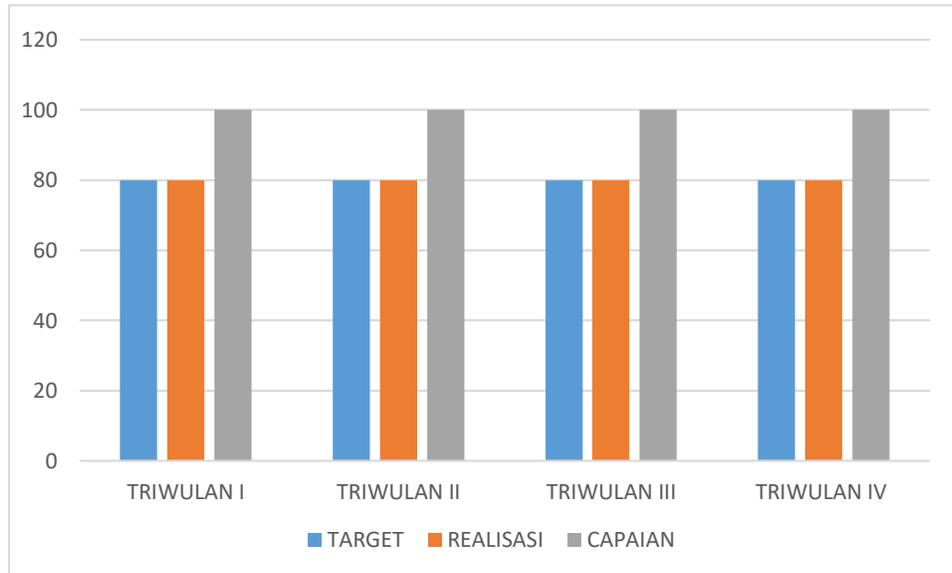
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021, namun pada tahun 2022 terdapat indikator kinerja kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi dengan nilai 80. Sehingga capaian kinerja mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat											
IKK.5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	-	-	100%	-	-	100%	80	80	100%	Terdapat kenaikan

D.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 terdapat target kinerja pada tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan nilai 80. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.36 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	80	80	80	80
REALISASI	80	80	80	80
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

E. SK6 MENINGKATNYA BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. IKK 6.1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

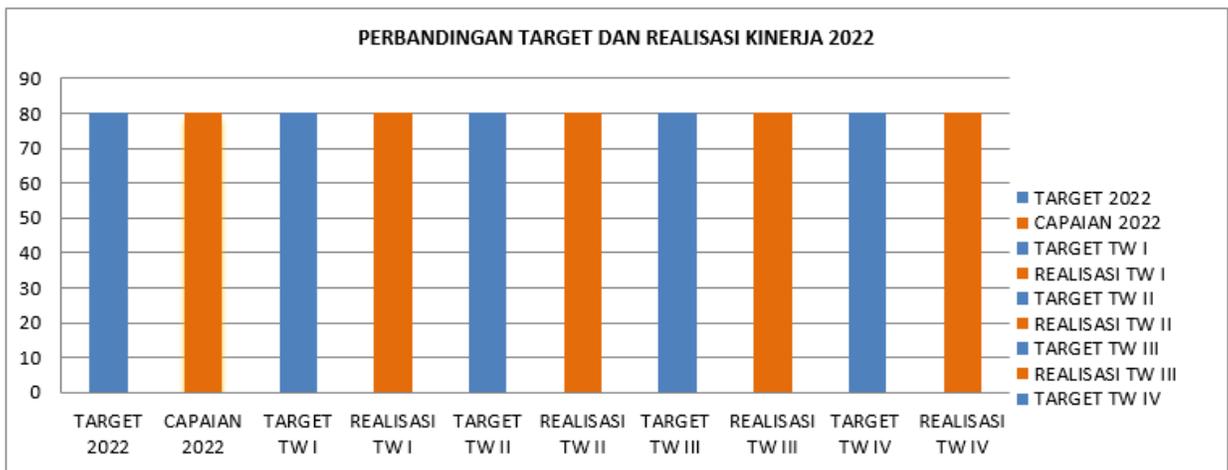
E.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

E.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

E.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2022 mempunyai nilai 80 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan nilai 80, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.37. Grafik Capaian IKK Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

E.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan perkantoran.

Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2022 mempunyai nilai 80. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memenuhi target yang ditetapkan.

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap tingkat penyelenggaraan perkantoran Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebanyak Rp. 73.084.192.960,- dari total pagu sebesar Rp. 73.091.825.000,- atau sebesar 99,98% dengan rincian sebagai berikut :

1. Layanan Perkantoran dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 37.434.770.000,- dan realisasi mencapai Rp. 37.429.297.960,- atau 99,99%;
2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi dukungan anggaran sebesar Rp. 408.000.000,- dan realisasi mencapai Rp.407.951.795,- atau 99,99%;
3. Layanan Perkantoran / Gaji dukungan anggaran sebesar Rp. 35.249.055.000,- dan realisasi mencapai Rp. 35.246.943.205,- atau 99,99%.

E.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2022 ini Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan perkantoran telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan selalu terus berupaya meningkatkan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat melalui :

1. Melaksanakan sosialisasi / memberikan edukasi kepada para pegawai tentang pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan dukungan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan perkantoran;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

Pada Tahun 2022 ini Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan selalu terus berupaya meningkatkan kemampuan

penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

E.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

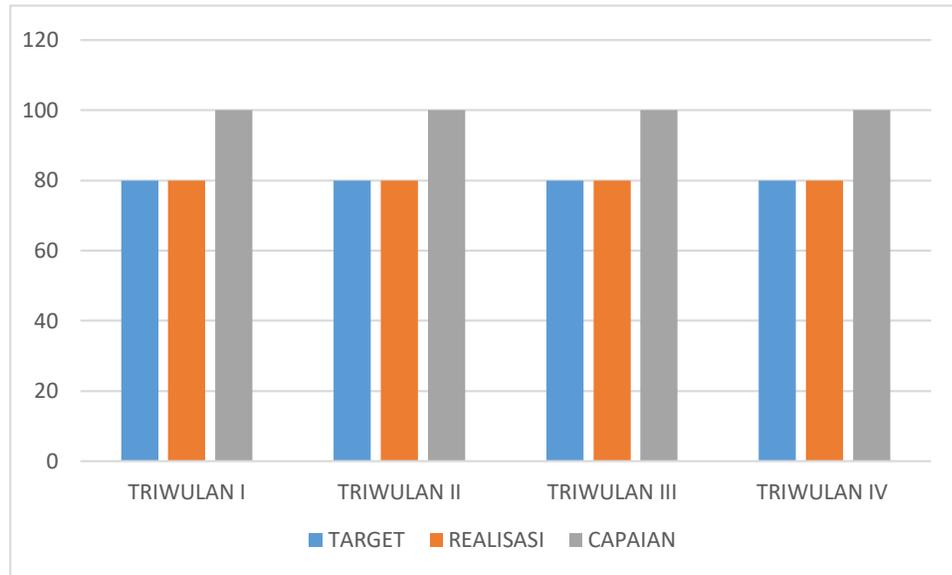
Tidak terdapat Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Namun, pada tahun 2022 terdapat indikator kinerja tingkat penyelenggaraan perkantoran dengan nilai 80. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.19 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat											
IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	-	-	100%	-	-	100%	80	80	100%	Terdapat kenaikan

E.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 terdapat target kinerja pada tahun 2022 atas indikator kinerja kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat dengan nilai 80. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.38 yang dapat dilihat di bawah ini :



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	80	80	80	80
REALISASI	80	80	80	80
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

III.3 REALISASI ANGGARAN

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2022

Pagu Anggaran Awal Tahun 2022 Posisi 1 Januari 2022 sebesar Rp.159.993.635.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Sumber Dana

RM	:	Rp.	117.643.635.000,-
PNBP	:	Rp.	300.000.000,-
SBSN PBS	:	Rp.	42.050.000.000,-
TOTAL	:	Rp.	159.993.635.000,-

- Rincian Jenis Belanja

Belanja Pegawai	:	Rp.	39.421.116.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	59.340.945.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	61.231.574.000,-
Total	:	Rp.	159.993.635.000,-

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Triwulan IV TA. 2022 pada Revisi DIPA ke 14 tanggal 14 Desember 2022 sehingga total pagu per 31 Desember 2022 pada DIPA BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah sebesar **Rp. 160.450.382.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Sumber Dana

RM	:	Rp.	117.132.681.000,-
PNBP	:	Rp.	3.939.163.000,-
SBSN PBS	:	Rp.	39.378.538.000,-
TOTAL	:	Rp.	160.450.382.000,-

- Rincian Jenis Belanja

Belanja Pegawai	:	Rp.	35.249.055.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	60.256.950.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	64.944.377.000,-
Total	:	Rp.	160.450.382.000,-

- Refocusing* Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan DIPA Revisi ke-14 yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2022, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada BPTD Wilayah IX Jawa Barat sebesar Rp. 160.450.382.000,- Dari pagu awal sebesar Rp. 159.993.635.000,-

- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022
Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut :
 - a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 2999 2857 3070 1684 pada tanggal 16 Desember 2021 (Revisi ke-1);
 - b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 6029 9004 0062 9388 pada tanggal 16 Maret 2022 (Revisi ke-2).
 - c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 6449 7048 7008 0190 pada tanggal 12 April 2022 (Revisi ke-3).
 - d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 5838 3110 4358 7746 pada tanggal 14 Juni 2022 (Revisi ke-4).
 - e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 5732 6077 2481 4211 pada tanggal 21 Agustus 2022 (Revisi ke-5).
 - f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 0957 0711 0694 4601 pada tanggal 31 Agustus 2022 (Revisi ke-6).
 - g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 4479 7413 4170 2899 pada tanggal 05 Oktober 2022 (Revisi ke-7).
 - h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 1935 2611 2885 5428 pada tanggal 12 Oktober 2022 (Revisi ke-8).
 - i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 2392 8143 4819 1248 pada tanggal 25 Oktober 2022 (Revisi ke-9).
 - j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 0247 9905 0357 6090 pada tanggal 08 November 2022 (Revisi ke-10).
 - k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 3101 5066 0403 0386 pada tanggal 17 November 2022 (Revisi ke-11).
 - l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 7190 6528 8441 3664 pada tanggal 24 November 2022 (Revisi ke-12).

- m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 6812 3821 3361 4807 pada tanggal 05 Desember 2022 (Revisi ke-13).
- n. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2022 kode *digital stamp* : 6812 3821 3361 4807 pada tanggal 14 Desember 2022 (Revisi ke-14).

• Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2022

NO	KETERANGAN	RM	PNBP	SBSN	TOTAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pagu Awal	117.643.635.000	300.000.000	42.050.000.000	159.993.635.000
2.	Revisi ke-01	117.643.635.000	300.000.000	42.050.000.000	159.993.635.000
3.	Revisi ke-02	117.483.982.000	300.000.000	42.050.000.000	159.833.982.000
4.	Revisi ke-03	117.783.982.000	-	42.050.000.000	159.833.982.000
5.	Revisi ke-04	117.783.982.000	-	42.050.000.000	159.833.982.000
6.	Revisi ke-05	117.783.982.000	-	42.050.000.000	159.833.982.000
7.	Revisi ke-06	111.057.184.000		42.050.000.000	153.107.184.000
8.	Revisi ke-07	115.576.525.000	2.239.163.000	42.050.000.000	159.865.688.000
9.	Revisi ke-08	115.576.525.000	2.239.163.000	39.378.538.000	157.194.226.000
10.	Revisi ke-09	118.568.709.000	2.239.163.000	39.378.538.000	160.186.410.000
11.	Revisi ke-10	118.568.709.000	3.939.163.000	39.378.538.000	161.886.410.000
12.	Revisi ke-11	118.568.709.000	3.939.163.000	39.378.538.000	161.886.410.000
13.	Revisi ke-12	118.568.709.000	3.939.163.000	39.378.538.000	161.886.410.000
14.	Revisi ke-13	117.132.681.000	3.939.163.000	39.378.538.000	160.450.382.000
15.	Revisi ke-14	117.132.681.000	3.939.163.000	39.378.538.000	160.450.382.000

Sumber : Layanan SatuDJA

- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I TA. 2022
Belanja Pegawai	Rp. 39.421.116.000,-	-	Rp. 39.421.116.000,-
Belanja Barang	Rp. 59.340.945.000,-	(Rp. 159.653.000,-)	Rp. 59.181.292.000,-
· RM	Rp. 59.040.945.000,-	(Rp. 159.653.000,-)	Rp. 58.881.292.000,-
· PNBPN	Rp. 300.000.000,-	-	Rp. 300.000.000,-
Belanja Modal	Rp. 61.231.574.000,-	-	Rp. 61.231.574.000,-
· RM	Rp. 19.181.574.000,-	-	Rp. 19.181.574.000,-
· PNBPN	-	-	-
· SBSN	Rp. 42.050.000.000,-	-	Rp. 42.050.000.000,-
TOTAL	Rp. 159.993.635.000,-	(Rp.159.653.000,-)	Rp. 159.833.982.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II TA. 2022
Belanja Pegawai	Rp. 39.421.116.000,-	-	Rp. 39.421.116.000,-
Belanja Barang	Rp. 59.340.945.000,-	(Rp. 259.653.000,-)	Rp. 59.081.292.000,-
· RM	Rp. 59.040.945.000,-	Rp. 40.347.000,-	Rp. 59.081.292.000,-
· PNBPN	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-	-
Belanja Modal	Rp. 61.231.574.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 61.331.574.000,-
· RM	Rp. 19.181.574.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 19.281.574.000,-
· PNBPN	-	-	-
· SBSN	Rp. 42.050.000.000,-	-	Rp. 42.050.000.000,-
TOTAL	Rp. 159.993.635.000,-	(Rp.159.653.000,-)	Rp. 159.833.982.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN III TA. 2022
Belanja Pegawai	Rp. 39.421.116.000,-	(Rp. 2.672.061.000,-)	Rp. 36.749.055.000,-
Belanja Barang	Rp. 59.340.945.000,-	(Rp. 259.653.000,-)	Rp. 59.081.292.000,-
· RM	Rp. 59.040.945.000,-	Rp. 40.347.000,-	Rp. 59.081.292.000,-
· PNBP	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-	-
Belanja Modal	Rp. 61.231.574.000,-	(Rp. 3.954.737.000,-)	Rp. 57.276.837.000,-
· RM	Rp. 19.181.574.000,-	Rp. 3.954.737.000,-	Rp. 15.226.837.000,-
· PNBP	-	-	-
· SBSN	Rp. 42.050.000.000,-	-	Rp. 42.050.000.000,-
TOTAL	Rp. 159.993.635.000,-	(Rp.6.886.451.000,-)	Rp. 153.107.184.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN IV TA. 2022
Belanja Pegawai	Rp. 39.421.116.000,-	(Rp. 4.172.061.000,-)	Rp. 35.249.055.000,-
Belanja Barang	Rp. 59.340.945.000,-	(Rp. 916.005.000,-)	Rp. 60.256.950.000,-
· RM	Rp. 59.040.945.000,-	(Rp. 747.658.000,-)	Rp. 58.293.287.000,-
· PNPB	Rp. 300.000.000,-	(Rp. 1.663.663.000,-)	Rp. 1.963.663.000,-
Belanja Modal	Rp. 61.231.574.000,-	(Rp. 3.954.737.000,-)	Rp. 64.944.377.000,-
· RM	Rp. 19.181.574.000,-	(Rp. 4.408.765.000,-)	Rp. 23.590.339.000,-
· PNPB	-	(Rp. 1.975.500.000,-)	Rp. 1.975.500.000,-
· SBSN	Rp. 42.050.000.000,-	(Rp. 2.671.462.000,-)	Rp. 39.378.538.000,-
TOTAL	Rp. 159.993.635.000,-	(Rp.456.747.000,-)	Rp. 160.450.382.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW I
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	5.936.848.000	5.777.195.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	43.361.195.000	43.361.195.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	29.440.422.000	29.440.422.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.447.693.000	4.447.693.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	37.386.361.000	37.386.361.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	39.421.116.000	39.421.116.000
Jumlah	159.993.635.000	159.833.982.000

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW II
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	5.936.848.000	5.777.195.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	43.361.195.000	43.361.195.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	29.440.422.000	29.060.422.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.447.693.000	4.827.693.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	37.386.361.000	37.386.361.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	39.421.116.000	39.421.116.000
Jumlah	159.993.635.000	159.833.982.000

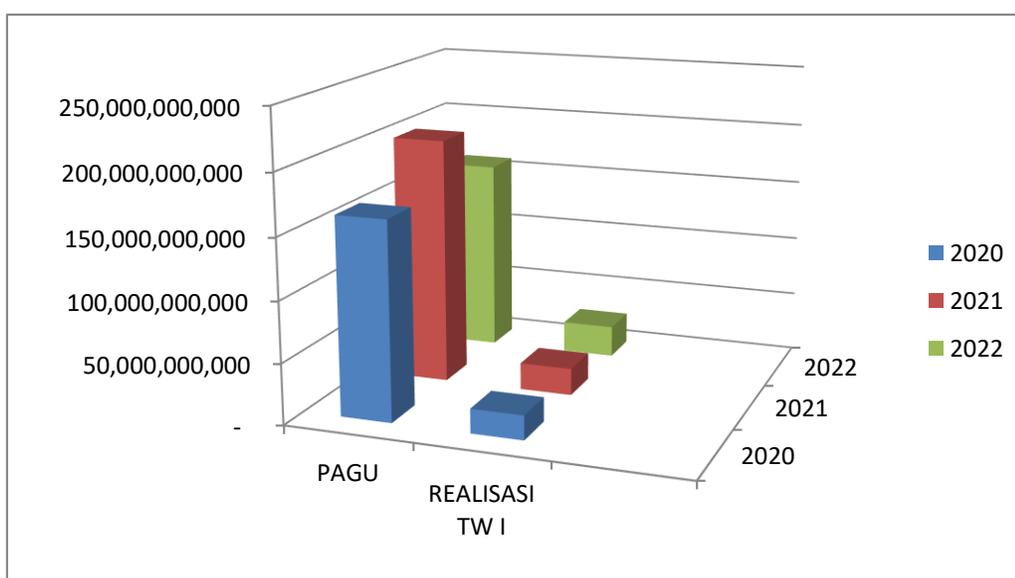
Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW III
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	5.936.848.000	5.777.195.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	43.361.195.000	43.361.195.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	29.440.422.000	25.005.685.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.447.693.000	4.827.693.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	37.386.361.000	37.386.361.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	39.421.116.000	36.749.005.000
Jumlah	159.993.635.000	153.107.184.000

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW IV
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	5.936.848.000	5.511.485.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	43.361.195.000	42.550.733.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	29.440.422.000	32.821.919.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.447.693.000	6.474.419.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	37.386.361.000	37.842.770.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	39.421.116.000	35.249.005.000
Jumlah	159.993.635.000	160.450.382.000

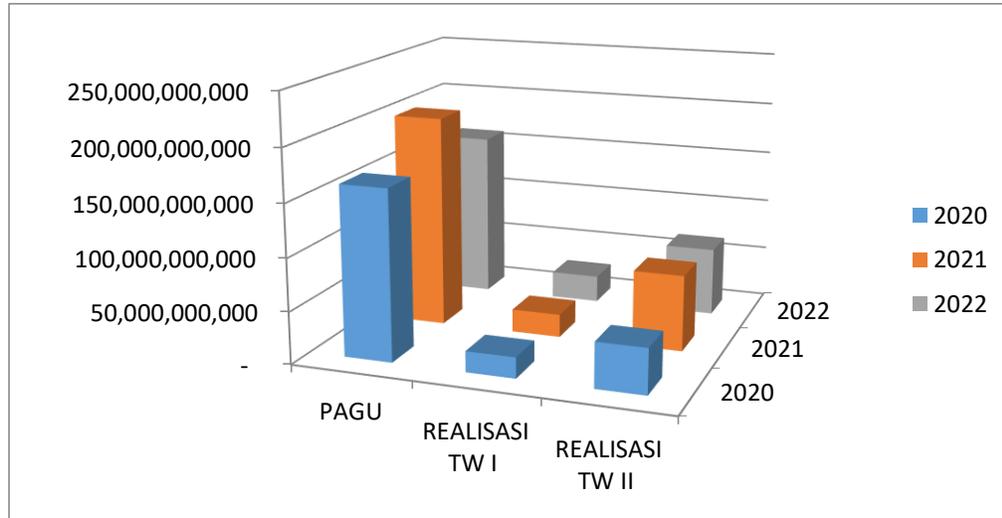
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2022

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2022, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

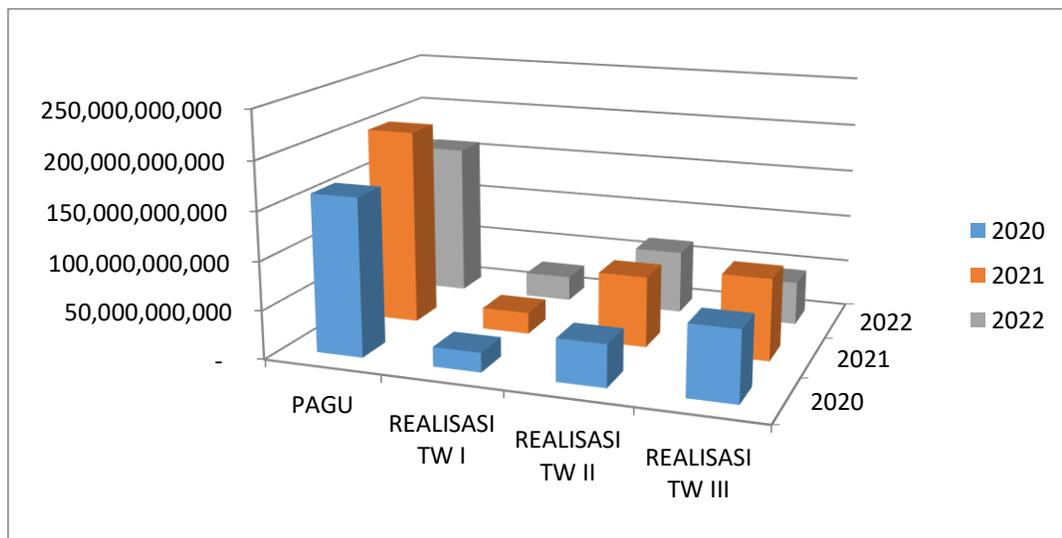
No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi Triwulan I	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	138.187.896.000,-	162.636.267.000,-	20.039.202.787,-	12,32%
2	2021	167.696.923.000,-	202.741.892.000,-	22.244.075.100,-	10,97%
3	2022	159.993.635.000,-	159.833.982.000,-	25.948.818.630,-	16,23%



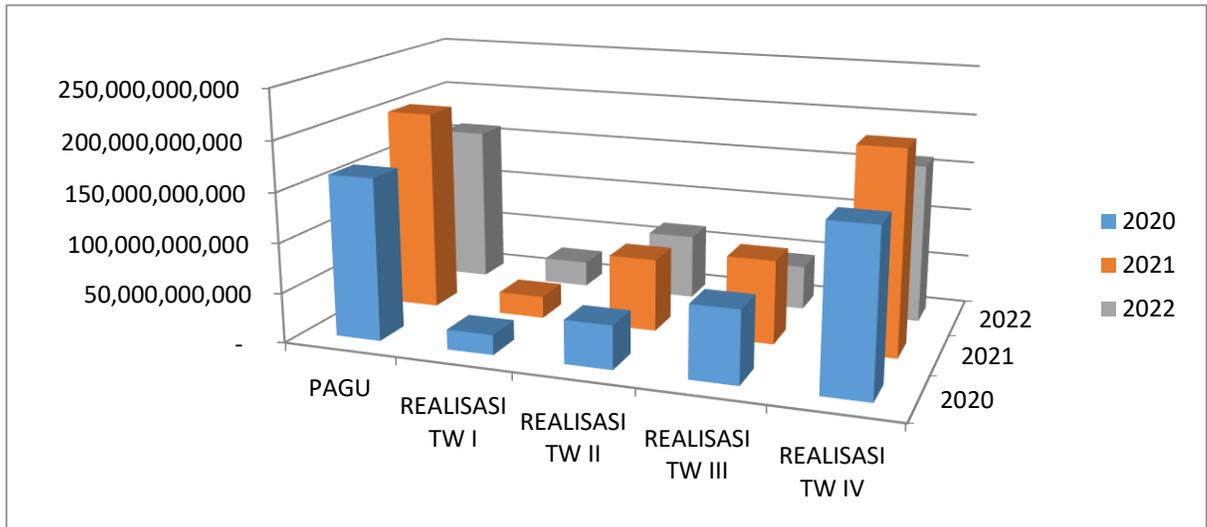
	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi Triwulan II	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	138.187.896.000,-	162.636.267.000,-	43.485.125.863,-	26,74%
2	2021	167.696.923.000,-	202.741.892.000,-	73.076.845.134,-	36,04%
3	2022	159.993.635.000,-	159.833.982.000,-	65.760.269.887,-	41,14%



	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi Triwulan III	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	138.187.896.000,-	162.636.267.000,-	90.342.492.916,-	55,55%
2	2021	167.696.923.000,-	202.741.892.000,-	118.591.260.413,-	58,49%
3	2022	159.993.635.000,-	153.107.184.000,-	108.146.432.257,-	70,63%



	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi Triwulan IV	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	138.187.896.000,-	162.636.267.000,-	160.550.090.938,-	98,72%
2	2021	167.696.923.000,-	202.741.892.000,-	205.562.649.458,-	99,91%
3	2022	153.107.184.000,-	160.450.382.000,-	160.353.969.185,-	99,94%



III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022.
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.160.353.969.185,-** atau mencapai **99,94%** dari total pagu sebesar **Rp.160.450.382.000,-**
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022
Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu TW I	Realisasi TW I		Pagu TW II	Realisasi TW II		Pagu TW III	Realisasi TW III		Pagu TW IV	Realisasi TW IV	
		(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	39,421,116	6,984,762	17.72	39,421,116	15,978,266	40.53	36,749,055	26,046,750	70.88	35,249,055	35,231,610	99.95
2	Belanja Barang	59,181,292	9,433,961	15.94	59,081,292	25,212,115	42.67	59,081,292	39,635,304	67.09	60,256,950	60,181,065	99.87
3	Belanja Modal	61,231,574	9,530,096	15.56	61,331,574	24,569,889	40.06	57,276,837	42,464,377	74.14	64,944,377	64,941,293	100.00
TOTAL		159,833,982	25,948,819	16.23	159,833,982	65,760,270	41.14	153,107,184	108,146,431	70.63	160,450,382	160,353,968	99.94

- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu TW I	Realisasi TW I		Pagu TW II	Realisasi TW II		Pagu TW III	Realisasi TW III		Pagu TW IV	Realisasi TW IV	
		(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)	Rp.	%
1	Rupiah Murni	117,483,982	16,601,495	14.13	117,783,982	42,158,709	35.79	111,057,184	73,777,164	66.43	117,132,681	117,040,282	99.92
2	PNBP	300,000	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	3,939,163	3,935,148	99.90
3	SBSN	42,050,000	9,347,324	22.23	42,050,000	23,601,561	56.13	42,050,000	34,369,267	81.73	39,378,538	39,378,538	100.00
TOTAL		159,833,982	25,948,819	16.23	159,833,982	65,760,270	41.14	153,107,184	108,146,431	70.63	160,450,382	160,353,969	99.94

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana pada Triwulan IV Tahun 2022 menunjukkan tren yang positif walaupun belum maksimal, anggaran yang bersumber dana PNBP sudah tersedia.

- Analisis Dana yang Tidak Terserap
Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW I	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	39.421.116.000	6.984.761.698	32.436.354.302
2	Belanja Barang	59.181.292.000	9.433.961.122	49.747.330.878
3	Belanja Modal	61.231.574.000	9.530.095.810	51.701.478.190
TOTAL		159.833.982.000	25.948.818.630	133.885.163.370

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW II	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	39.421.116.000	15.978.266.202	23.442.849.798
2	Belanja Barang	59.081.292.000	25.212.114.875	33.869.177.125
3	Belanja Modal	61.331.574.000	24.569.888.810	36.761.685.190
TOTAL		159.833.982.000	65.760.269.887	94.073.712.113

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW III	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	36.749.055.000	26.046.750.170	10.702.304.830
2	Belanja Barang	59.081.292.000	39.635.304.516	19.445.987.484
3	Belanja Modal	57.276.837.000	42.464.377.571	14.821.459.429
TOTAL		153.107.184.000	108.146.432.257	44.960.751.743

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW IV	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	35.249.055.000	35.231.610.301	17.444.699
2	Belanja Barang	60.256.950.000	60.181.065.446	75.884.554
3	Belanja Modal	64.944.377.000	64.941.293.438	3.083.562
TOTAL		160.450.382.000	160.353.969.185	96.412.815

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2022

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	117.483.982.000	16.601.494.860	100.882.487.140
2	PNBP	300.000.000	-	300.000.000
3	SBSN	42.050.000.000	9.347.323.770	32.702.676.230
TOTAL		159.833.982.000	25.948.818.630	133.885.163.370

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan II Tahun 2022

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	117.783.982.000	42.158.709.019	75.625.272.981
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	42.050.000.000	23.601.560.868	18.448.439.132
TOTAL		159.833.982.000	65.760.269.887	94.073.712.113

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan III Tahun 2022

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	111.057.184.000	73.777.164.764	37.280.019.236
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	42.050.000.000	34.369.267.493	7.680.732.507
TOTAL		153.107.184.000	108.146.432.257	44.960.751.743

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2022

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	117.132.681.000	117.040.282.733	92.398.267
2	PNBP	3.939.163.000	3.935.148.452	4.014.548
3	SBSN	39.378.538.000	39.378.538.000	7.680.732.507
TOTAL		160.450.382.000	160.353.969.185	96.412.815

Dari total pagu anggaran BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 160.450.382.000,- (Seratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 160.353.969.185,- (Seratus Enam Puluh Milyar Tiga

Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 99,94% sehingga total dana yang belum terserap di lingkungan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp 96.412.815,- (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) atau sebesar 0,06%.

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan sumber daya berdasarkan program per Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
	% Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi TW I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi TW II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi TW III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi TW IV)	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi	87.50%	15.25%	72.25%	91.67%	38.99%	52.68%	96.67%	62.81%	33.86%	96.67%	99.13%	-2.46%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	25.00%	21.78%	3.22%	85.00%	55.70%	29.30%	85.00%	81.26%	3.74%	85.00%	100.00%	-15.00%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	62.18%	3.55%	58.63%	72.62%	14.81%	57.81%	78.53%	57.40%	21.13%	78.53%	99.99%	-21.46%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100.00%	15.08%	84.92%	100.00%	42.09%	57.91%	100%	68.12%	31.88%	100%	99.95%	0.05%
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	100.00%	18.12%	81.88%	100.00%	43.06%	56.95%	100%	69.67%	30.34%	100%	99.94	0.06%
TOTAL		74.94%	16.23%	58.71%	89.86%	41.14%	48.72%	92.04%	70.63%	21.41%	100.00%	99.94%	0.06%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 99,94 % menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 0,06%.

III.3.4 Hambatan dan Kendala

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami hambatan kendala yang terlalu signifikan, berbeda dengan Tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, seperti banyak pekerjaan yang mengalami kemunduran jadwal pelaksanaan karena pembatasan aktivitas, dan lain-lain. Pada Tahun 2022 ini memang masih dihadapkan dengan kondisi pandemi namun berkaca pada pengalaman pada tahun sebelumnya BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat relatif masih bisa mengantisipasi kondisi serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dapat menuntaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi target kinerja pada Triwulan IV ini maupun pencapaian realisasi anggaran yang cukup memuaskan.

BAB IV

PENUTUP



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra Tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun ketiga, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2022 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$) dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada LKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 100% dari target Tahun 2022 100%;
 - b. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terealisasi sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;
 - c. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi terealisasi sebanyak 10 dari target 10 Lokasi;
 - d. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda terealisasi sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;
 - e. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 0% dari target 0%;
 - f. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebanyak 15 dari target 15 Lokasi;
 - g. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar 100% dari target 100%;
 - h. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 100% dari target 100%;

- i. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP sebesar 100% dari target 100%;
 - j. Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 90% dari target 90%;
 - k. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 35% dari target 35%;
 - l. Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan sebanyak 21 dari target 21 Lokasi;
 - m. Jumlah ketersediaan taman edukatif sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;
 - n. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebanyak 0 dari target 0 Orang;
 - o. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (*UN-ECE*)* sebanyak 0 dari target 0 Unit;
 - p. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 0% dari target 0%;
 - q. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;
 - r. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan realisasi nilai 80 dari target nilai 80;
 - s. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan realisasi nilai 80 dari target nilai 80.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan yang prima;
 3. Realisasi pencapaian kinerja BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sangat baik, dengan rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan ini sebesar 100% dari target keseluruhan sasaran kegiatan Tahun 2022.

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV TAHUN 2022			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 1.3	Jumlah terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	10	10	100%	TERCAPAI	Memastikan Terminal Tipe-A yang telah beroperasi mendapatkan dukungan operasional SDM dan anggaran yang memadai.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi TSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	15	15	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi TSDP
2	SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe A	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Sarana dan Prasarana pendukung penerapan SMART Terminal Tipe-A dapat tersedia dengan baik.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi TSDP
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	90	90	100%	TERCAPAI	Memastikan Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terus dilakukan peningkatan guna menuju kondisi ideal yang diharapkan	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	35	100%	TERCAPAI	Mendorong upaya kesadaran para pengusaha Angkutan Barang untuk secara aktif mendukung terwujudnya penurunan jumlah angka pelanggaran pada UPPKB.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

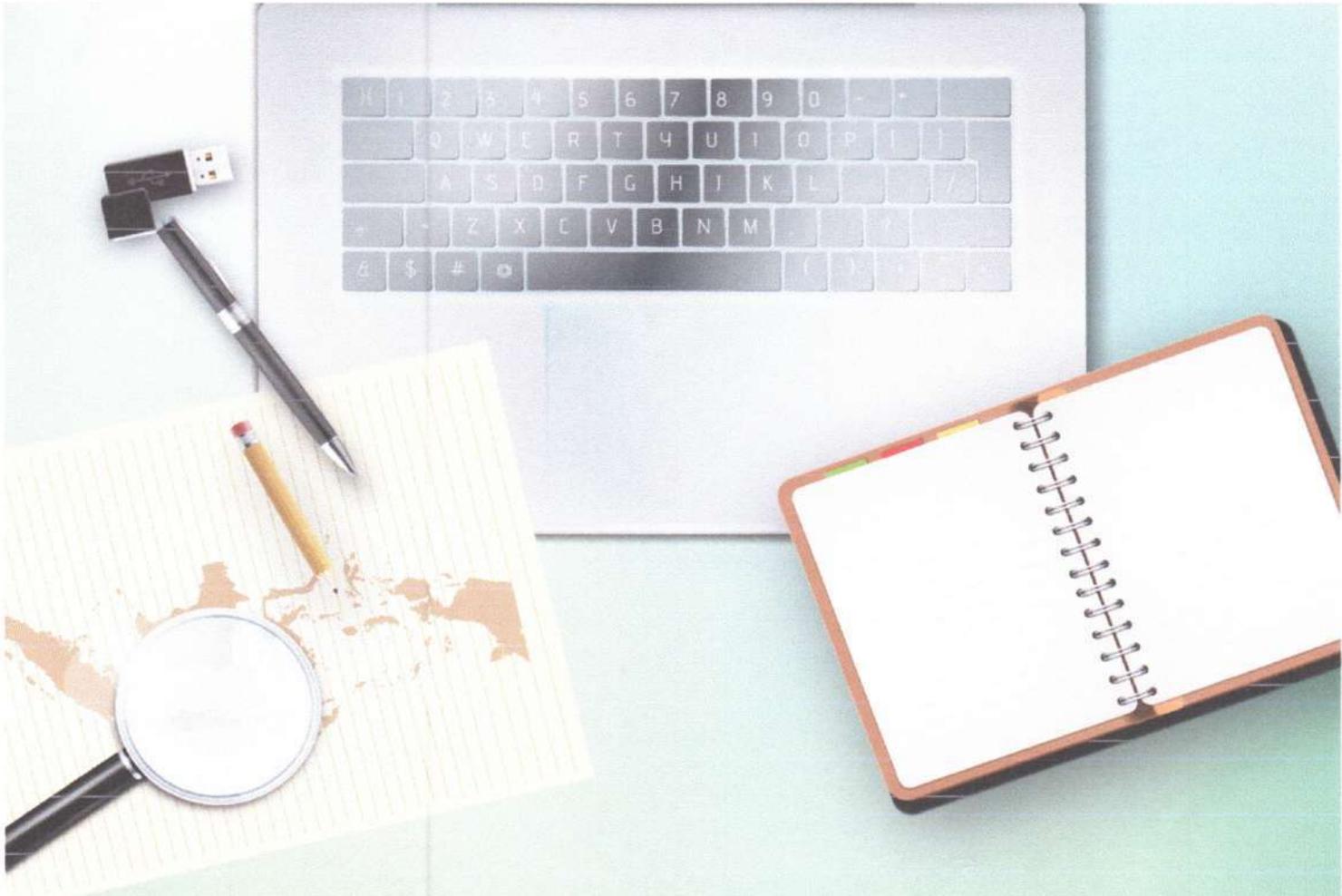
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV TAHUN 2022			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	21	21	21	100%	TERCAPAI	Mendorong upaya penyediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0	0	0	0%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 7.b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15	15	15	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi TSDP
4	SK5 Meningkatkan Pelayanan Trasnportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80	80	80	100%	TERCAPAI	-.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKK 6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	100%	TERCAPAI	-.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT



RENCANA KINERJA TAHUNAN



2022

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WIL. IX
PROVINSI JAWA BARAT

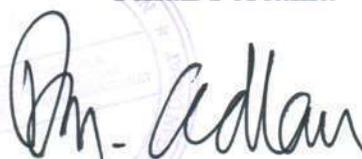
RENCANA KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	80

Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 5.936.848.000
2.	Program Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 43.361.195.000
3.	Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 29.440.422.000
4.	Program Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.447.693.000
5.	Program Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 37.386.361.000
6.	Program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 39.421.116.000
	TOTAL	RP 159.993.635.000

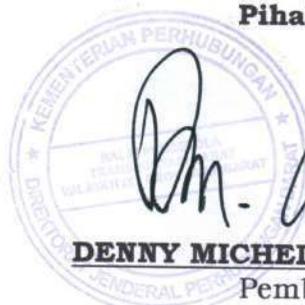
Pihak Kedua



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDI KURNIADI, ST.**

Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 3 Januari 2022
Pihak Pertama

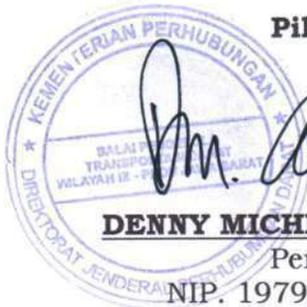
EDI KURNIADI, ST.
Penata Tk.1 (III/d)
NIP. 19741130 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROPINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	80

Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002

Pihak Pertama

EDI KURNIADI, ST.

Penata Tk.1 (III/d)

NIP. 19741130 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUDU SUTRISNO ATD**

Jabatan : **KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

RUDU SUTRISNO ATD

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19711229 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROPINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100



Pihak Kedua

Denny Michels Adlan

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

Rudu Sutrisno AtD

RUDU SUTRISNO ATD

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19711229 199301 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOFAN MUIS, AMD.LLAJ,SE,MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

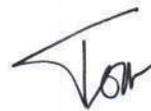
Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002



TOFAN MUIS, AMD.LLAJ,SE,MM
Pembina (IV/a)

NIP. 19761226 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROPINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-

Pihak Kedua



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



TOFAN MUIS, AMD.LLAJ,SE,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19761226 199903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DJOKO SRIJANTO, ATD., MSI**

Jabatan : **KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU,
PENYEBERANGAN PERINTIS**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 3 Januari 2022

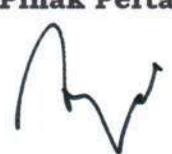
Pihak Kedua



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002

Pihak Pertama



DJOKO SRIJANTO, ATD., MSI
Pembina (IV/a)

NIP. 19680417 199103 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI TRANSPORTASI SDP KOMERSIAL DAN PERINTIS
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan transportasi angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15



Pihak Kedua

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

DJOKO SRIJANTO, ATD., MSI

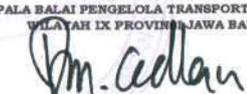
Peembina (IV/a)

NIP. 19680417 199103 1 007



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB				
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Rp.	5.936.848.000	LLAJ		
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LLAJ	
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Rp.	25.519.475.000	LLAJ	
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LLAJ
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSDP
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp.	1.311.195.000	TSDP	
2	SP2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp.	25.519.475.000	SARPRAS		
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp.	25.519.475.000	SARPRAS		
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp.	1.311.195.000	TSDP		
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	10%	15%	20%	20%	20%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	90%	Rp.	18.321.251.000	LLAJ		
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	0%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	20%	21%	21%	26%	35%	Rp.	6.169.471.000	LLAJ		
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	0	0	5	5	5	15	15	16	19	19	21	21	Rp.	2.949.700.000	LLAJ		
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LLAJ	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Rp.	300.000.000	LLAJ		
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECER)	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SARPRAS
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SARPRAS
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSDP
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp.	4.447.693.000	TU		
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp.	76.807.477.000	TU		

Bandung, 3 Januari 2022
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19790205 200604 1 002



2022

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
WIL. IX PROVINSI JAWA BARAT



Revisi I Perjanjian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

REVISI I PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Gilang Adi Subagja, S.A.P.	Pengelola Kepegawaian	26/7-2022	
2.	Diperiksa	Edi Kurniadi, S.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/07-2022	
3.	Disetujui	Edi Kurniadi, S.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/07-22	
4.	Disetujui	Supriyanto, S.Si.T., M.T.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27/07-2022	
5.	Disetujui	Tofan Muis, A.Md.LLAJ., S.E., M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan	28/7 2022	
6.	Disetujui	Djoko Srijanto, A.TD., M.Si.	Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Perintis	28/7 2022	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK 7.b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5.	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Kegiatan		Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	5.777.195.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	43.361.195.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	29.060.422.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.827.693.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	37.386.361.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	39.421.116.000

Disetujui,
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 1 Agustus 2022
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi Kurniadi, S.T.

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat


DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 1 Agustus 2022
Pihak Pertama
Kepala Subbagian Tata Usaha


EDI KURNIADI, S.T.
NIP. 19741130 200312 1 006

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
2.	SK6 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Disetujui,
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 1 Agustus 2022
Kepala Subbagian Tata Usaha



EDI KURNIADI, S.T.
NIP. 19741130 200312 1 006



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyanto, S.SiT., M.T.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 1 Agustus 2022

Pihak Pertama

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SUPRIYANTO, S.SiT., M.T.
NIP. 19811025 200212 1 002

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

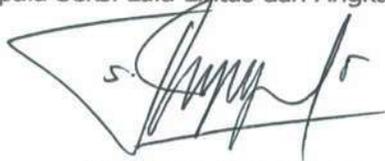
REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
2.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100

Disetujui,
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat


DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 1 Agustus 2022
Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


SUPRIYANTO, S.SIT., M.T.
NIP. 19811025 200212 1 002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tofan Muis, A.Md.LLAJ., S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 1 Agustus 2022

Pihak Pertama



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

TOFAN MUIS, A.Md.LLAJ., S.E., M.M.
NIP. 19761226 199903 1 004

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
2.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-

Disetujui,
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 1 Agustus 2022
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

TOFAN MUIS, A.Md.LLAJ., S.E., M.M.
NIP. 19761226 199903 1 004



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Djoko Srijanto, ATD., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Perintis

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 1 Agustus 2022

Pihak Pertama

Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan
Penyeberangan Perintis

DJOKO SRIJANTO, ATD., M.Si.
NIP. 19680417 199103 1 007

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

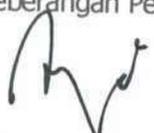
REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PERINTIS
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK 7.b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15

Disetujui,
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat


DENNY MICHELS ADNAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 1 Agustus 2022
Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Perintis


DJOKO SRIJANTO, ATD., M.Si.
NIP. 19680417 199103 1 007



REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

NO	SABARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB			
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Rp	5.777.195.000	LLAJ	
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	LLAJ	
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Rp	25.519.475.000	LLAJ
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	LLAJ
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	TSDP
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp	1.311.195.000	TSDP
2	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	25.519.475.000	SARPRAS	
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	25.519.475.000	SARPRAS	
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	1.311.195.000	TSDP	
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	10%	15%	20%	20%	20%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	90%	Rp	18.321.251.000	LLAJ	
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	0%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	20%	21%	21%	26%	35%	Rp	5.789.471.000	LLAJ	
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	0	0	5	5	5	15	15	16	19	19	21	21	21	Rp	2.949.700.000	LLAJ
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	LLAJ
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	Rp	300.000.000	LLAJ
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	SARPRAS
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	SARPRAS
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	Rp	1.311.195.000	TSDP
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp	4.447.693.000	TU	
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp	76.807.477.000	TU	

Bandung, 1 Agustus 2022
KAPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
 Pembina (IV/4)
 NIP. 19700205-200604-1-002



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 2 Desember 2022
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%

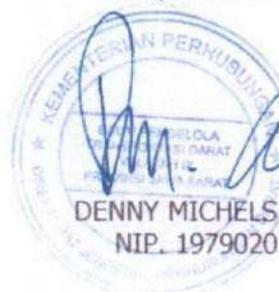
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK 7.b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5.	SK6 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Kegiatan		Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	5.511.486.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	42.550.733.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	32.821.919.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	6.866.856.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	37.386.361.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	36.749.055.000

Disetujui,
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 2 Desember 2022
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danny Irawan, S.SiT.

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 1 September 2022

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Tata Usaha

DANNY IRAWAN, S.SiT.
NIP. 19850325 200912 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
2.	SK6 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Disetujui,
 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
 Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
 NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 1 September 2022
 Kepala Subbagian Tata Usaha



DANNY IRAWAN, S.SiT.
 NIP. 19850325 200912 1 001



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Edi Kurniadi, S.T

Jabatan : Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Perintis

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 1 September 2022

Pihak Pertama

Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan
Penyeberangan Perintis

EDI KURNIADI, S.T.

NIP. 19741130 200312 1 006

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.

NIP. 19790205 200604 1 002

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PERINTIS
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 7.b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	15

Disetujui,
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Bandung, 1 September 2022
Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Perintis



EDI KURNIADI, S.T.
NIP. 19741130 200312 1 006



REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

NO	SARAPAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB			
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	BKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintihan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Rp	5.511.486,000	LLAJ	
		BKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	LLAJ	
		BKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Rp	25.007.314,000	LLAJ
		BKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	LLAJ
		BKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintihan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	TSDP
		BKK1.6	Jumlah pelebaran SDP yang beroperasi	Lokasi	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp	1.272.195,000	TSDP
2	SP2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	BKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	25.007.314,000	SARPRAS	
		BKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	25.007.314,000	SARPRAS	
		BKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelebaran SDP	%	100	Pada Pelebaran Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	1.272.195,000	TSDP	
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	BKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	10%	15%	20%	20%	20%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	90%	Rp	24.346.383,000	LLAJ	
		BKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	0%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	20%	21%	21%	26%	35%	Rp	5.509.380,000	LLAJ	
		BKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoBS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	Rp	2.802.215,000	LLAJ
		BKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	LLAJ
		BKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	LLAJ
		BKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	SARPRAS
		BKK3.7	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	SARPRAS
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	BKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp	6.866.856,000	TU	
		BKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp	74.135.416,000	TU	

Bandung, 2 Desember 2022
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DENNY MUBSES ADLAK, S.T., M.M.
Shapahna (IV/a)
NIK 19790205 200604 1 002



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1) NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN JANUARI				REALISASI BULAN JANUARI		% CAPAIAN BULAN JANUARI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	10%	10%	0	0%	10%	-	100%	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikola	10	10	100%	1.250.000.000	4.90%	10	1.235.856.835	100%	4.84%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	0	0	15	-	100%	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikola	100%	10%	10%	1.250.000.000	4.90%	10%	1.235.856.835	100%	4.84%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikola	100%	10%	10%	1.250.000.000	4.90%	10%	1.235.856.835	100%	4.84%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	10%	10%	0	0%	10%	-	100%	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	10%	11.11%	0	0%	10%	-	100%	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	0%	0%	415.000.000	7.17%	0%	410.936.537	0	7.10%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	0	0%	0	0%	0	-	0	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	-	-	0	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	70	88%	75.000.000	1.69%	70	72.682.490	100%	1.63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Dijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	70	88%	5.800.000.000	7.55%	70	5.791.716.751	100%	7.54%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1) NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN MARET				REALISASI BULAN MARET		% CAPAIAN BULAN MARET		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	25%	25%	850.000.000	15%	25%	881.072.200	100%	15.25%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikolera	10	10	100%	5.350.000.000	20.96%	10	5.321.124.600	100%	20.85%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	145.000.000	11.06%	15	144.650.000	100%	11.03%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	25%	25%	5.350.000.000	21%	25%	5.321.124.600	100%	20.85%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	25%	25%	5.350.000.000	20.96%	25%	5.321.124.600	100%	20.85%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	25%	25%	145.000.000	11%	25%	144.650.000	100%	11.03%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	20%	22.22%	0	0%	20%	-	100%	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	1.250.000.000	21.59%	18%	1.223.902.788	180%	21.14%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	5	24%	0	0%	5	-	0	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	675.000.000	15.18%	80	670.508.751	100%	15.08%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Dijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Saran dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	16.500.000.000	21.48%	80	16.432.045.288	100%	21.39%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1)	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN APRIL				REALISASI BULAN APRIL		% CAPAIAN BULAN APRIL		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
									TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	30%	30%	1,300,000,000	23%	30%	1,344,008,400	100%	23.26%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ	
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikolera	10	10	100%	9,500,000,000	37.23%	10	9,438,537,773	100%	36.99%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0.00%	-	-	LLAJ	
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0.00%	-	-	TSDP	
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	400,000,000	30.51%	15	420,316,500	100%	32.06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	25%	25%	9,500,000,000	37%	25%	9,438,537,773	100%	36.99%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	25%	25%	9,500,000,000	37.23%	25%	9,438,537,773	100%	36.99%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	25%	25%	400,000,000	31%	25%	420,316,500	100%	32.06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	20%	22.22%	0	0%	20%	-	100%	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	2,250,000,000	38.86%	10%	2,360,920,316	100%	40.78%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	5	24%	0	0%	5	-	0	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	1,450,000,000	32.60%	80	1,484,689,866	100%	33.38%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	25,000,000,000	32.55%	80	25,778,707,287	100%	33.56%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1) NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN MEI				REALISASI BULAN MEI		% CAPAIAN BULAN MEI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	40%	40%	1,750,000,000	30%	40%	1,792,011,100	100%	31.02%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikoloka	10	10	100%	10,850,000,000	42.52%	10	10,893,851,301	100%	42.69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	145,000,000	11.06%	15	468,466,500	100%	35.73%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikoloka	100%	25%	25%	10,890,000,000	42.52%	25%	10,893,851,301	100%	42.69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikoloka	100%	25%	25%	10,890,000,000	42.52%	25%	10,893,851,301	100%	42.69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	25%	25%	145,000,000	11%	25%	468,466,500	100%	35.73%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	20%	22.22%	0	0%	20%	-	100%	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	2,750,000,000	47.50%	10%	2,727,847,759	100%	47.12%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	5	24%	0	0%	5	-	0	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	1,650,000,000	37.10%	80	1,638,584,479	100%	36.84%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Dijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	30,000,000,000	39.06%	80	30,384,152,627	100%	39.56%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1) NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN JUNI				REALISASI BULAN JUNI		% CAPAIAN BULAN JUNI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	50%	50%	2.254.000.000	39%	50%	2.254.947.200	100%	39.03%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikolera	10	10	100%	12.500.000.000	48.98%	10	12.828.035.468	100%	50.27%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	600.000.000	45.76%	15	639.915.250	100%	48.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TSDP
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	75%	75%	12.500.000.000	49%	75%	12.828.035.468	100%	50.27%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	SARPRAS
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	75%	75%	12.500.000.000	48.98%	75%	12.828.035.468	100%	50.27%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	SARPRAS
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	75%	75%	600.000.000	46%	75%	639.915.250	100%	48.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TSDP
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	60%	66.67%	1250000000	7%	60%	1.234.800.000	100%	6.74%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	15%	43%	1.250.000.000	21.59%	15%	1.223.902.788	100%	21.14%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	15	71%	0	0%	15	-	0	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	2.000.000.000	44.97%	80	2.032.131.244	100%	45.69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Dijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	37.250.000.000	48.50%	80	37.301.384.017	100%	48.56%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1)	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN JULI				REALISASI BULAN JULI		% CAPAIAN BULAN JULI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
									TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
	1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi																	
			IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	50%	50%	2.700.000.000	47%	60%	2.702.950.000	120%	46.79%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikolera	10	10	100%	13.000.000.000	50.94%	10	13.454.105.564	100%	52.72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	690.000.000	52.62%	15	694.579.250	100%	52.97%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TSDP
	2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat																	
			IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	75%	75%	13.000.000.000	51%	75%	13.454.105.564	100%	52.72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	SARPRAS
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	75%	75%	13.000.000.000	50.94%	75%	13.454.105.564	100%	52.72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	SARPRAS
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	75%	75%	690.000.000	53%	75%	694.579.250	100%	52.97%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TSDP
	3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat																	
			IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perengkapan Jalan	90%	60%	66.67%	3.370.000.000	18%	60%	3.378.854.000	100%	18.44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
			IKK3.2	Persentase penganggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Penganggaran pada UPPKB	35%	15%	43%	3.350.000.000	57.86%	15%	3.355.104.865	100%	57.95%	Operasional sudah berjalan namun presentase penganggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	15	71%	0	0%	15	-	0	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang ter sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
	4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																	
			IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	2.360.000.000	53.06%	80	2.364.888.698	100%	53.17%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
	5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat																	
			IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	39.900.000.000	51.95%	80	39.948.381.483	100%	52.01%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

(1)	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN AGUSTUS				REALISASI BULAN AGUSTUS		% CAPAIAN BULAN AGUSTUS		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
									TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
	1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	50%	50%	3,160,000,000	55%	70%	3,165,886,100	140%	54.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ	
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikolera	10	10	100%	15,400,000,000	60.35%	10	15,436,545,648	100%	60.49%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ	
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP	
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	780,000,000	59.49%	15	782,797,250	100%	59.70%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TSDP
	2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat																	
			IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	75%	75%	15,400,000,000	60%	80%	15,436,545,648	107%	60.49%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	SARPRAS
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikolera	100%	75%	75%	15,400,000,000	60.35%	80%	15,436,545,648	107%	60.49%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	SARPRAS
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	75%	75%	780,000,000	59%	80%	782,797,250	107%	59.70%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TSDP
	3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat																	
			IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perengkapan Jalan	90%	60%	66.67%	8,650,000,000	47%	65%	8,652,454,000	108%	47.23%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	15%	43%	3,770,000,000	65.12%	20%	3,775,173,647	133%	65.21%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	15	71%	0	0%	16	-	0	0.00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
	4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																	
			IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	2,960,000,000	66.55%	80	2,968,036,795	100%	66.73%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
	5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat																	
			IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Saran dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	45,175,000,000	58.82%	80	45,179,874,711	100%	58.82%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1) NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN OKTOBER				REALISASI BULAN OKTOBER		% CAPAIAN BULAN OKTOBER		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	50%	50%	3,628,000,000	63%	90%	3,628,822,200	180%	62.81%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikoloka	10	10	100%	17,300,000,000	67.79%	10	17,302,080,026	100%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	866,000,000	66.05%	15	866,640,250	100%	66.10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TSDP
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikoloka	100%	75%	75%	17,300,000,000	68%	85%	17,302,080,026	113%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	SARPRAS
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikoloka	100%	75%	75%	17,300,000,000	67.79%	85%	17,302,080,026	113%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	SARPRAS
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	75%	75%	866,000,000	66%	85%	866,640,250	113%	66.10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TSDP
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perengkapan Jalan	90%	60%	66.67%	8,820,000,000	48%	70%	8,823,954,000	117%	48.16%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	15%	43%	4,370,000,000	75.48%	21%	4,371,177,202	140%	75.50%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	15	71%	726,000,000	25%	19	726,828,136	0	24.64%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	LLAJ
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	866,000,000	66%	15	866,640,250	0%	0.00%	-	-	TSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	3,200,000,000	71.95%	80	3,208,592,954	100%	72.14%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	51,500,000,000	67.05%	80	51,508,352,959	100%	67.06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1)	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN NOVEMBER				REALISASI BULAN NOVEMBER		% CAPAIAN BULAN NOVEMBER		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	50%	50%	3,628,000,000	63%	100%	3,628,822,200	200%	62.81%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikoloka	10	10	100%	17,300,000,000	67.79%	10	17,302,080,026	100%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP
			Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	866,000,000	66.05%	15	866,640,250	100%	66.10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikoloka	100%	75%	75%	17,300,000,000	68%	90%	17,302,080,026	120%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
			Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikoloka	100%	75%	75%	17,300,000,000	67.79%	90%	17,302,080,026	120%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
			Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	75%	75%	866,000,000	66%	90%	866,640,250	120%	66.10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	60%	66.67%	8,820,000,000	48%	75%	8,823,954,000	125%	48.16%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			Persentase pelanggaran pada UPPKB Diijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	15%	43%	4,370,000,000	75.48%	26%	4,371,177,202	173%	75.50%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
			Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	15	71%	726,000,000	25%	21	726,828,136	0	24.64%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			Jumlah masyarakat yang ter sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
			Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS
			Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	866,000,000	66%	15	866,640,250	0%	0.00%	-	-	TSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	3,200,000,000	71.95%	80	3,208,592,954	100%	72.14%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Diijen Perhubungan Darat	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diijen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	51,500,000,000	67.05%	80	51,508,352,959	100%	67.06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

(1)	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN DESEMBER				REALISASI BULAN DESEMBER		% CAPAIAN BULAN DESEMBER		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
									TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
	1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	50%	50%	3,628,000,000	63%	100%	3,628,822,200	200%	62.81%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ	
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG	Terminal Tipe-A dikola	10	10	100%	17,300,000,000	67.79%	10	17,302,080,026	100%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ	
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	TSDP	
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	866,000,000	66.05%	15	866,640,250	100%	66.10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
	2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat																	
			IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikola	100%	75%	75%	17,300,000,000	68%	100%	17,302,080,026	133%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikola	100%	75%	75%	17,300,000,000	67.79%	100%	17,302,080,026	133%	67.80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	SARPRAS
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	75%	75%	866,000,000	66%	100%	866,640,250	133%	66.10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	TSDP
	3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat																	
			IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perengkapan Jalan	90%	60%	66.67%	8,820,000,000	48%	90%	8,823,954,000	150%	48.16%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	15%	43%	4,370,000,000	75.48%	35%	4,371,177,202	233%	75.50%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	LLAJ
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Fasilitas ZoSS di Jawa Barat	21	15	71%	726,000,000	25%	21	726,828,136	0	24.64%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan	LLAJ
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ	
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang ter sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Pekan Keselamatan Nasional	100	0	0%	0	0%	0	-	0%	0.00%	-	-	LLAJ
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS	
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	0%	0.00%	-	-	SARPRAS	
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahar pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	866,000,000	66%	15	866,640,250	0%	0.00%	-	-	TSDP	
	4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																	
			IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	80	100%	3,200,000,000	71.95%	80	3,208,592,954	100%	72.14%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU
	5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Diijen Perhubungan Darat																	
			IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diijen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Saran dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum Transportasi Darat	80	80	100%	51,500,000,000	67.05%	80	51,508,352,959	100%	67.06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan	TU